

**PENGARUH SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU  
JASA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN  
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN *FRAUD***



**MARSITA WURI ANDARI 17919053**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN**

**EKONOMIKA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**Juli 2020**

**PENGARUH SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM  
PENCEGAHAN *FRAUD***

**Tesis S-2**



**MARSITA WURI ANDARI**

**17919053**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**Juli 2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang sebelumnya pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

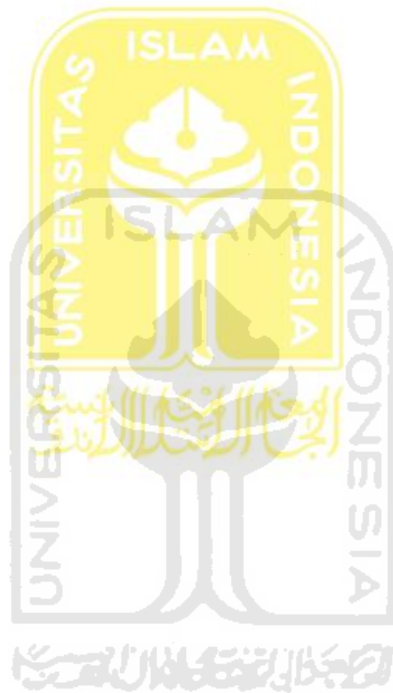
Yogyakarta, 28 Juli 2020

Penulis,



Marsita Wuri Andari

## HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 30 Juli 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin'.

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**MARSITA WURI ANDARI**

No. Mhs. : 17919053

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN FRAUD**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, SSi., M.Com(IS)., Ph.D., CfrA.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam melalui tahapan demi tahapan penyelesaian tugas akhir (tesis) ini. Penulis menyadari bahwa tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya. Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud”**.

Tugas akhir (tesis) ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir (tesis) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFrA.** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak **Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan sehingga tugas akhir (tesis) ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. **Seluruh dosen** yang ditugaskan pada **Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan mengasah keterampilan (*skill*) penulis dengan sabar dan tulus ikhlas sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini.
5. Almarhum Ayah dan Ibu tercinta, Bapak **Sumarmanto** yang telah lebih dahulu berpulang ke Rahmatullah dan Ibu **Asiyah** yang selalu mendukung secara moril maupun materiil, Alhamdulillah tertunaikan sudah janji penulis kepada beliau berdua untuk mengenyam pendidikan setingkat lebih tinggi dan InSyaaAllah dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.
6. Mertua tercinta, Bapak **Budi** dan Bu **Nunik** atas doa dan dorongan semangat yang selalu diberikan.

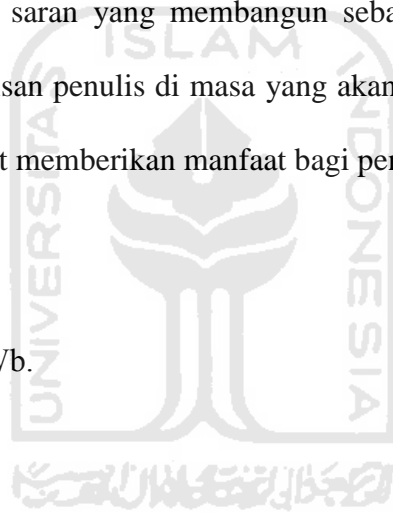
7. Suami tercinta, **Adi Herman Sulistio** atas doa dan dorongan semangat yang tak pernah putus serta bantuan yang tak terhingga dalam proses pengerjaan tugas akhir (tesis) ini.
8. Kakak dan kakak ipar tercinta, **Ari, Dewi, Sinta, Edi, Suci, dan Christo** atas doa dan dorongan semangatnya.
9. Keponakan-keponakan tercinta, **Farel, Nendra, Kyara, Ghifar, Marvel, dan Abigail** sebagai *moodboster* penulis.
10. Seluruh keluarga besar **Atmodiharjo** dan **Soetatmadi** atas doa dan dorongan semangat yang selalu diberikan.
11. Sahabat-sahabat tersayang, **Zakiah, Gita, Disa, Dila, Rian, Reny, Anistria, dan Ayu Candra** atas doa dan dorongan semangat yang selalu diberikan.
12. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia khususnya **Maksi 16** atas doa, dorongan semangat, dan bantuan yang diberikan sehingga tugas akhir (tesis) ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Seluruh **aparatur sipil kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE Kabupaten/Kota dan Provinsi D.I.Yogyakarta** atas kesediaan, kerjasama, dan bantuan yang diberikan sehingga tugas akhir (tesis) ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Seluruh **rekan kerja** penulis pada **Institut Teknologi Nasional Yogyakarta**, khususnya kepada **Bapak Iwan Aminto Ardi, ST.** atas doa dan dorongan semangat yang selalu diberikan.



15. Serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan tugas akhir (tesis) ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir (tesis) ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan bimbingan dari pihak-pihak terkait.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir (tesis) ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan/atau saran yang membangun sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi tulisan-tulisan penulis di masa yang akan datang. Semoga laporan tugas akhir (tesis) ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 28 Juli 2020  
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marsita Wuri Andari', written in a cursive style.

Marsita Wuri Andari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. Kajian Teori .....	12
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.1.2. Teori Segitiga Kecurangan ( <i>Fraud Triangle Theory</i> ).....	14
2.1.3. Teori Tata Kelola Pemerintahan ( <i>Public Governance Theory</i> ) .....	16
2.2. Riset Terdahulu .....	19
2.3. Pencegahan Fraud .....	30
2.4. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa ( <i>E-procurement</i> ).....	31
2.5. Sistem Pengendalian Internal ( <i>Internal Control System</i> ).....	33

2.6. Komitmen Organisasi .....	34
2.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	34
2.8. Kerangka Pemikiran.....	35
2.9. Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	35
2.9.1. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	35
2.9.2. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	37
2.9.3. Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	38
2.9.4. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	39
2.9.5. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	40
2.9.6. Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	41
2.9.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Metode dan Jenis Penelitian.....	44
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.3.1. Sumber Data.....	47
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	48
3.4.1. Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) .....	48
3.4.2. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa (X1) .....	48
3.4.3. Sistem Pengendalian Internal (X2) .....	48
3.4.4. Komitmen Organisasi (X3).....	49
3.4.5. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (X4) .....	49
3.5. Teknik Pengujian Hipotesis .....	50
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	50
3.5.2. Uji Kualitas Data.....	50
a. Uji Validitas .....	50

b. Uji Reliabilitas .....	51
3.5.3. R-Square, F-Square, dan Q-Square.....	52
3.5.4. Uji Hipotesis .....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1. Gambaran Umum Penelitian.....	54
4.2. Daftar Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE.....	55
4.3. Klasifikasi Responden Penelitian.....	56
4.3.1. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin ..	57
4.3.2. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Usia.....	58
4.4. Analisis Data .....	59
4.4.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	59
4.4.2. Penilaian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	61
a. <i>Convergent Validity</i> .....	62
b. <i>Discriminant Validity</i> .....	66
c. <i>Composite Reliability</i> .....	69
4.4.3. Penilaian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	70
4.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	74
4.5.1. Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	76
4.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	78
4.5.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	80
4.5.4. Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	81
4.5.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	84
4.5.6. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	86
4.5.7. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> .....	88
4.5.8. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung ( <i>Indirect Effect</i> ).....	89

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
5.1. Simpulan .....	93
5.2. Implikasi Penelitian .....	96
5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	97
1. Keterbatasan Penelitian.....	97
2. Saran Penelitian .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99
<b>LAMPIRAN</b> .....	105



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1. Daftar Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE.....	55
Tabel 4.2. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.3. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif .....	60
Tabel 4.5. Nilai <i>Outer Loadings (Measurement Model)</i> .....	65
Tabel 4.6. Nilai <i>Cross Loadings (Discriminant Validity)</i> .....	67
Tabel 4.7. Nilai AVE dan $\sqrt{\text{AVE}}$ .....	68
Tabel 4.8. Nilai Cronbach Alpha dan <i>Composite Reliability</i> .....	69
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi ( <i>R-Square dan R-Square Adjusted</i> ).....	72
Tabel 4.10. Hasil Pengujian <i>Effect Size (F-Square)</i> .....	73
Tabel 4.11. Hasil Pengujian Hipotesis .....	75
Tabel 4.12. Pengaruh Tidak Langsung ( <i>Indirect Effect</i> ).....	90

## DAFTAR GAMBAR

2.1. <i>The Fraud Triangle</i> .....	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	35
4.1. Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor .....	63
4.2. Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor .....	64
4.3. Nilai Loading Factor Model Struktural (Inner Model).....	71



## DAFTAR GRAFIK

4.1. Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
4.2. Responden Penelitian Berdasarkan Usia.....	59



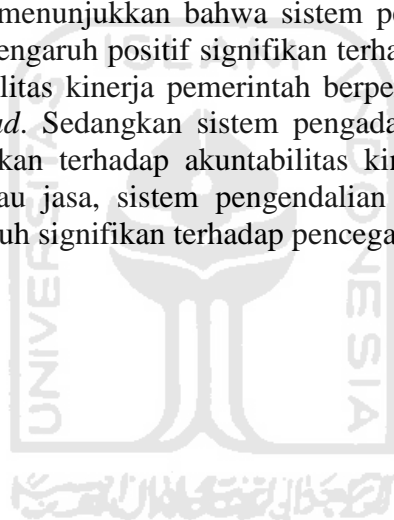


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	106
Lampiran 2. Rekapitulasi Kuesioner Penelitian.....	114
Lampiran 3. Output Smart PLS.....	127
Statistik Deskriptif .....	128
Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor Sebelum Potong .....	128
Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor Sesudah Potong.....	129
Nilai Loading Factor Model Struktural (Inner Model) .....	130
Outer Loadings.....	130
Path Coefficients .....	132
Total Indirect Effects .....	133
Spesific Indirect Effects .....	134
R Square dan R Square Adjusted.....	134
R Square Charts .....	134
F Square .....	135
Construct Reliability dan Validity .....	135
Construct Reliability dan Validity Charts .....	136
Discriminant Validity.....	136
Discriminant Validity Charts .....	138
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian .....	139
Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta.....	140
Bagian Layanan Pengadaan Kab. Gunungkidul .....	141
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Kulon Progo.....	142

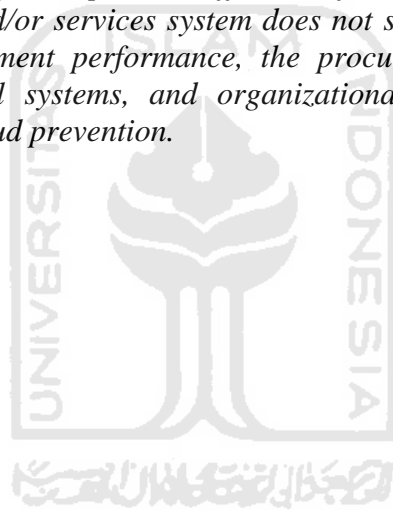
## ABSTRAK

Peningkatan kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi sorotan berbagai pihak dimana mayoritas kasus berasal dari sektor pemerintahan khususnya bidang pengadaan barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan *fraud*. Data penelitian adalah data primer diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis dengan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan program smartPLS. Populasi penelitian adalah aparatur kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta. Sampel penelitian berjumlah 85 sampel menggunakan *purposive sampling method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah serta akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sistem pengadaan barang dan/atau jasa, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.



## ABSTRACT

*The increase in corruption cases in Indonesia from year to year has come under the spotlight of various parties where the majority of cases come from the government sector, especially in goods and/or services procurement. This study aims to analyze the factors that influence the accountability of government performance in fraud prevention. Research data is primary data obtained through questionnaires and analyzed with Partial Least Square (PLS) using the smartPLS program. Research population is the office apparatus of ULP/BLP/BPBJ and LPSE in the District/City and D.I. Yogyakarta province. Research sample are 85 samples using a purposive sampling method. The results showed that the internal control system and organizational commitment had a significant positive effect on government performance accountability and accountability of government performance had a significant positive effect on fraud prevention. While the procurement of goods and/or services system does not significantly influence the accountability of government performance, the procurement of goods and/or services, internal control systems, and organizational commitment does not significantly influence fraud prevention.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan/atau jasa merupakan salah satu sektor yang rentan akan berbagai macam penyalahgunaan atau kecurangan (*fraud*). Hasanuddin (2013) menjelaskan bahwa menurut *Program Director Indonesia Procurement Watch* (IPW) Hayie Muhammad sebanyak 70% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia bersumber dari pengadaan barang dan/atau jasa baik di pusat maupun di daerah.

Ihsanuddin (2019) menjelaskan bahwa menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah berada pada peringkat kedua tertinggi dari seluruh kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan bahwa Kementerian Agama terlibat kasus korupsi dalam pengadaan laboratorium komputer untuk tahun fiskal 2011 dan pengadaan Al-Quran dimana kasus tersebut dikaitkan dengan suap yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang bertujuan untuk memenangkan *tender*. (Nurlina dkk., 2018).

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia pada sektor pemerintahan bidang pengadaan barang dan/atau jasa mengindikasikan ketidakpatuhan dan ketidakkonsistenan dari penerapan peraturan perundang-undangan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta adanya konflik kepentingan

dalam kementerian dan/atau lembaga terkait. Hal tersebut dapat membuka kesempatan/peluang (*opportunity*) bagi pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian internal yang buruk dapat memicu/memberikan peluang seseorang untuk melakukan perbuatan *fraud* dan tindakan yang melawan hukum (Widiutami dkk., 2017).

Sistem pengendalian internal harus menjadi bagian dari keseluruhan pengelolaan organisasi (Nurlina dkk., 2018). Pengelolaan organisasi tidak dapat digeneralisasikan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam organisasi maka segala bentuk penyalahgunaan dan upaya korupsi dapat ditekan/diminimalkan. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk merancang dan menetapkan sistem pengendalian internal yang baik dan disesuaikan dengan organisasi. Manajemen juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian guna memastikan bahwa sistem pengendalian internal organisasi telah berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan dan sasaran (*goals*) organisasi.

Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) adalah salah satu bentuk pengendalian internal yang dapat diterapkan pada organisasi. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang dan/atau jasa, mendukung proses *monitoring* dan audit, serta memenuhi kebutuhan akan

akses informasi terbaru/terkini (Salim dkk., 2016). Nurlina dkk. (2018) menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) kedepannya diharapkan dapat menjadi sebuah aplikasi yang mendukung penerapan perwujudan kinerja yang lebih baik di antara lembaga-lembaga internal pemerintah dan pihak ketiga, dan membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Dengan terwujudnya *good governance* diharapkan dapat meminimalkan/menekan *fraud* di sektor pemerintahan.

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor/aspek yang diperkirakan menjadi alasan pembenaran mengapa seorang pegawai melakukan sebuah kecurangan (Widiutami dkk., 2017). Ketika pegawai memiliki komitmen rendah maka pegawai tersebut akan acuh tak acuh dan merasa tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi. Hal ini mengakibatkan pegawai menjadi tidak loyal terhadap organisasi sehingga pegawai cenderung bekerja sesuka hati dan berpotensi melakukan hal-hal menyimpang demi kepentingan pribadinya yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan sebelumnya mengenai penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dan sistem pengendalian internal (*internal control system*) sebagai upaya pencegahan *fraud*. Penelitian terkait sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) diantaranya dilakukan oleh Udoyono (2012) dan Danuta (2016). Udoyono (2012) meneliti tentang penerapan/implementasi

penyediaan barang dan jasa secara elektronik guna mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 layak (*ficible*) tetapi tidak akuntabel (*accountable*).

Danuta (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dalam mencegah terjadinya *fraud* pada proses pengadaan barang/jasa serta mengetahui bentuk sumbangsih/*support* yang diberikan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) pada audit yang dilakukan Inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* memiliki berbagai peran dalam mencegah terjadinya *fraud* yaitu mengurangi pengaturan lelang (*tender*), meningkatkan keamanan dan transparansi, mengurangi frekuensi tatap muka secara langsung, dan mencegah campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan (*intervensi*). *E-procurement* memiliki peran dalam mencegah timbulnya kesempatan dan tekanan untuk melakukan *fraud*. *E-procurement* juga memiliki peran dalam perwujudan pengadaan yang bebas korupsi, yaitu transparansi, kompetisi, dan kriteria objektif dalam pengambilan keputusan.

Adapun penelitian terkait sistem pengendalian internal (*internal control system*) diantaranya dilakukan oleh Purwitasari (2013) dan Widiutami dkk. (2017). Purwitasari (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi/fakta penting berkaitan dengan pengendalian internal dan komitmen organisasi perusahaan di dalam

proses pengadaan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan pada variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang.

Widiutami dkk. (2017) melakukan pengujian pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Nurlina dkk. (2018) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dan sistem pengendalian internal (*internal control system*) pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dalam mencegah kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian menunjukkan variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, variabel pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa memiliki



pengaruh/berpengaruh signifikan untuk deteksi *fraud*, dan variabel akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan pada deteksi *fraud*. Sedang variabel pengendalian internal tidak memiliki pengaruh/tidak berpengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud*.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengembangkan riset-riset terdahulu diantaranya adalah riset yang dilakukan oleh Nurlina dkk. (2018), dimana dalam pengembangannya dilakukan penambahan variabel potensial yaitu komitmen organisasi. Peneliti menganggap penting penambahan variabel tersebut dikarenakan komitmen organisasi merupakan salah satu hal penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran (*goals*) organisasi.

Penelitian tentang komitmen organisasi pernah dilakukan sebelumnya oleh Salim dkk. (2016) dan Purwitasari (2013). Pada penelitian Salim dkk. (2016), komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui pengaruh / efek moderasi komitmen organisasi pada implementasi sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dan pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan pada penelitian Purwitasari (2013), komitmen organisasi digunakan sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruh/efek komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.

Disamping hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis teori dasar untuk pengembangan model penelitian terkait dengan

akuntabilitas kinerja pemerintah dan pencegahan *fraud* yaitu teori keagenan (*agency theory*), teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), dan teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban–jawaban responden pada kuesioner yang disebarakan oleh peneliti kepada aparatur Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) atau Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLP) atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di kabupaten/kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di masing-masing lembaga.

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana dikutip dari *website* resmi Provinsi D.I. Yogyakarta, Humas (2020) menjelaskan bahwa D.I. Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat AA (terbaik) pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III selama 2 tahun berturut–turut yakni di tahun 2018 dan 2019. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling Method*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN**

## **ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN *FRAUD***

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah?
2. Apakah sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris variabel-variabel potensial yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan *fraud* meliputi:

1. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

2. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud*.
3. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis, wawasan, literatur, acuan pustaka, dan keilmuan berkaitan dengan pengaruh sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*) dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan penerapan dari pengetahuan atau wawasan yang diperoleh peneliti selama perkuliahan. Hasil penelitian ini merupakan pembuktian teori-teori yang diperoleh peneliti selama perkuliahan seperti teori keagenan (*agency theory*), teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*), sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-*

*procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*) dan komitmen organisasi yang kemudian dihubungkan/dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan *fraud*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pedoman literatur/acuan pustaka yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun, menerapkan, dan/atau mengoptimalkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*) dan komitmen organisasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih baik dalam upaya pencegahan *fraud*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan, rujukan, referensi, acuan pustaka, dan/atau pedoman literatur bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menindaklanjuti dan mengembangkan hasil penelitian ini atau melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dengan penelitian ini.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, riset-riset terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## **BABI III: Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi metode dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan teknik pengujian hipotesis.

## **BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan terkait hasil pengolahan data menggunakan program *smart*-PLS.

## **BAB V: Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran Penelitian**

Bab ini memuat kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Iqbal dan Murtanto (2016) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian/kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa bagi kepentingan prinsipal serta memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Tujuan teori keagenan adalah menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan kontrak dapat merancang kontrak yang bertujuan untuk meminimalkan biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang tidak pasti (Pongsapan, 2017).

Manajer (agen) secara moral bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal sedangkan disisi lain manajer (agen) berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Zelmiyanti, 2016). Nurharjanti (2017) menyatakan apabila agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal serta prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda dengan agen, hal ini dapat menimbulkan masalah prinsipal-agen, agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri namun tindakan tersebut dapat merugikan prinsipal.

*Conflict of interest* atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen dapat menyebabkan terjadinya *agency problem* (Iqbal dan Murtanto, 2016). *Conflict of interest* dapat memicu timbulnya biaya agensi (*agency cost*) dimana biaya tersebut merupakan tanggungan organisasi. Jika *conflict of interest* terus terjadi maka dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi, pihak-pihak di luar cakupan organisasi, atau organisasi bersama dengan pihak-pihak di luar cakupan organisasi.

Peneliti menggunakan teori keagenan (*agency theory*) untuk menjelaskan hubungan keagenan yang terjalin antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (agen) di sektor pemerintahan. Masyarakat memberikan kepercayaan (mandat) kepada pemerintah untuk mengelola pemerintahan (negara) sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan membawa perubahan negara ke arah yang lebih baik. Berdasarkan kepercayaan (mandat) yang diberikan oleh masyarakat tersebut pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keagenan (*agency theory*) karena akan melakukan pengujian empiris terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan *fraud*. Kaitan teori keagenan (*agency theory*) dengan penurunan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemerintah (agen) dituntut untuk melaksanakan kepercayaan (mandat) yang diberikan oleh



masyarakat (prinsipal) yaitu meningkatkan pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan membentuk komitmen organisasi agar terwujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih baik sehingga potensi terjadinya *fraud* dapat ditekan/diminimalkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan pemerintah dan menumbuhkan citra (*image*) baik pemerintah di mata masyarakat.

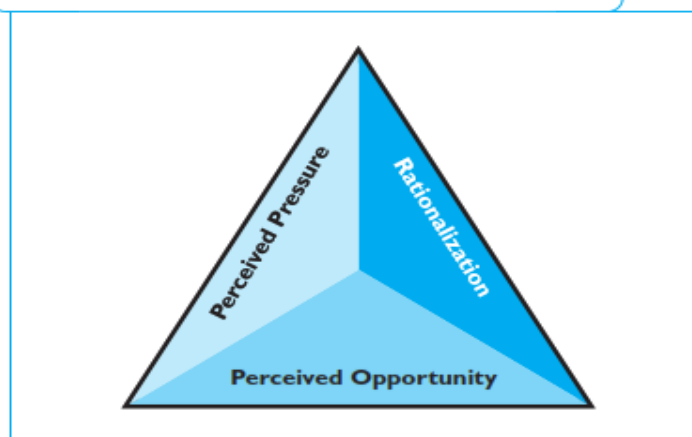
Oleh karena hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pencegahan *fraud* dengan menggunakan variabel independen sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi. Akuntabilitas kinerja pemerintah pada penelitian ini sebagai variabel *intervening* yang mempengaruhi hubungan variabel independen dengan variabel dependen (pencegahan *fraud*).

### **2.1.2. Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)**

Iqbal dan Murtanto (2016) menyatakan bahwa *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak tertentu dengan cara-cara yang tidak benar/menyimpang. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor pemerintahan (publik) maupun sektor swasta (perusahaan).

*Fraud triangle* terdiri dari tiga hal yang pada umumnya melatarbelakangi kecurangan (*fraud*) terjadi yaitu adanya tekanan (*pressure*), adanya kesempatan/peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) adalah keadaan dimana terdapat tekanan/dorongan kuat dalam diri seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kesempatan (*opportunity*) merupakan situasi/kondisi yang dapat memberikan peluang bagi pegawai atau manajemen untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dalam sebuah organisasi. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pola pikir pelaku kecurangan (*fraud*) sebagai bentuk pembenaran (rasionalisasi) dari perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Organisasi perlu merancang dan menerapkan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah, menekan, atau minimal dapat mendeteksi sedini mungkin aktivitas kecurangan (*fraud*) jika hal itu terjadi.

**FIGURE 2.2 THE FRAUD TRIANGLE**



*Sumber : Albrecht dkk. (2012)*

**Gambar 2.1 The Fraud Triangle**

Selain *agency theory*, penelitian ini juga menggunakan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) sehingga apabila kecurangan (*fraud*) terjadi akan dapat terdeteksi dengan cepat untuk meminimalkan kerugian yang diderita oleh instansi pemerintah. *Fraud triangle theory* membantu dalam menangkap sinyal dan deteksi dini apabila terjadi kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat membantu dalam menekan / pencegahan *fraud*.

Teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan variabel dependen pencegahan *fraud*. Kaitan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) dengan penurunan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan terbentuknya komitmen organisasi yang kuat diharapkan mampu membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan *awareness* terhadap *fraud*. Hal ini dapat mencegah terjadinya *fraud*, minimal instansi pemerintah tersebut mampu menangkap sinyal / deteksi dini apabila *fraud* terjadi.

### **2.1.3. Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Public Governance Theory*)**

Pergeseran zaman dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut pemerintah (agen) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah

kepada rakyat (prinsipal) terhadap kepercayaan (mandat) yang telah diberikan. Pernyataan ini didukung pendapat Sari (2012) yang menyatakan bahwa keterbukaan terhadap rakyat (*public disclosure*), hak terhadap informasi, keikutsertaan publik, dan tuntutan akan manajemen pemerintahan (publik) yang modern, menandai era peningkatan kesadaran (*awareness*) akan pentingnya *public governance* di Indonesia. Sari (2012) menyatakan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut pemerintahan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang dikelola pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Selain *agency theory* dan *fraud triangle theory*, penelitian ini juga menggunakan teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*). Teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*) digunakan untuk menjelaskan variabel *intervening* akuntabilitas kinerja pemerintah. Teori ini menjelaskan hubungan antara tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan *fraud*. Kaitan teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*) dengan penurunan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan terbentuknya

komitmen organisasi yang kuat dapat mendukung perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah dan tata kelola pemerintahan (*public governance*) yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam memperkecil peluang/celah terjadinya *fraud*.



## 2.2. Riset Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Variabel	Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Kelemahan dan Saran Penelitian
Nurlina dkk. (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem pengadaan barang dan jasa (<i>e-procurement</i>)</li> <li>▪ Sistem pengendalian internal</li> <li>▪ Akuntabilitas kinerja pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian pada Kantor Departemen Agama Provinsi Papua dan Kantor Agama kabupaten/kota di Papua.</li> <li>▪ Metode pengumpulan sampel dengan teknik <i>purposive sampling method</i>.</li> <li>▪ Jumlah responden/sampel penelitian sebanyak 47 orang.</li> <li>▪ Data dianalisis dengan menggunakan PLS (<i>Partial Least Square</i>).</li> <li>▪ Teori adaptasi kontrak melalui arbitrase, teori sistem akuntabilitas kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.</li> <li>▪ Pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.</li> <li>▪ Sistem pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap deteksi <i>fraud</i>.</li> <li>▪ Akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap deteksi <i>fraud</i>.</li> <li>▪ Pengendalian internal tidak memiliki pengaruh/tidak berpengaruh signifikan terhadap deteksi <i>fraud</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam jurnal penelitiannya peneliti tidak mencantumkan kelemahan dan saran penelitian yang berguna untuk penelitian selanjutnya.</li> </ul>

		<p>institusi/pemerintah, dan teori kecurangan pengadaan barang dan jasa,</p>		
<p>Widiutami dkk. (2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efektivitas pengendalian internal</li> <li>▪ Ketaatan aturan akuntansi</li> <li>▪ Komitmen organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner.</li> <li>▪ Penelitian pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng.</li> <li>▪ Teknik pengambilan sampel dengan <i>purposive sampling method</i>.</li> <li>▪ Sampel penelitian adalah kepala dan pegawai bagian keuangan pada 45 LPD dengan jumlah responden sebanyak 82 orang.</li> <li>▪ Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 20.0 for Windows.</li> <li>▪ Teori kecurangan dan kecurangan akuntansi, teori pengendalian internal, teori agensi, dan <i>fraud triangle theory</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi.</li> <li>▪ Ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi.</li> <li>▪ Komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) akuntansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada 5 (lima) Lembaga Perkreditan Desa yang masuk dalam kategori sehat pada setiap kecamatan, sehingga hasil penelitian kemungkinan belum mencerminkan keseluruhan kondisi/kondisi sebenarnya dari LPD yang ada.</li> <li>▪ Saran peneliti untuk LPD Kabupaten Buleleng diharapkan lebih memberikan perhatian pada pelaksanaan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi serta komitmen organisasi dari seluruh pegawai agar membantu meminimalkan terjadinya kecurangan.</li> <li>▪ Saran untuk penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan obyek, misalnya</li> </ul>

				dengan penambahan jumlah sampel penelitian dan responden penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian dengan melakukan penambahan variabel lain diantaranya variabel <i>personal financial need</i> , audit internal, dan kepuasan kerja.
Salim dkk. (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan total biaya perolehan</li> <li>▪ Perubahan karakteristik organisasi</li> <li>▪ Perubahan struktur pemerintahan</li> <li>▪ Spesifikasi sistem</li> <li>▪ Manajemen Pelaksanaan</li> <li>▪ Komitmen organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat eksplanatif.</li> <li>▪ Sampel penelitian adalah aparatur pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Parepare dengan total 140 sampel penelitian.</li> <li>▪ Data penelitian menggunakan metode survey dengan teknik kuesioner.</li> <li>▪ Data dianalisis menggunakan <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> berdasarkan program AMOS 23 dan SPSS 22.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efek moderasi komitmen organisasi pada implementasi <i>e-procurement</i> (perubahan total biaya perolehan, perubahan karakteristik organisasi, perubahan struktur pemerintahan, spesifikasi sistem, dan manajemen pelaksanaan) memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti memberikan saran bahwa pemerintah perlu meningkatkan percepatan penerapan sistem pengadaan secara elektronik (<i>e-procurement</i>) melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan harus dilakukan pemantauan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya <i>fraud</i> dan meminimalkan kerugian negara. Peneliti menilai komitmen aparatur pengadaan maupun peran auditor internal sangat penting dalam mewujudkan pengadaan</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teori <i>e-procurement</i>, teori <i>fraud</i>, teori <i>stewardship</i>, teori komitmen organisasi.</li> </ul>		barang/jasa yang sehat.
Purwitasari (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian internal</li> <li>▪ Komitmen organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Populasi penelitian ini adalah 5 rumah sakit di kota Bandung.</li> <li>▪ Teknik pemilihan sampel menggunakan metode <i>simple random sampling</i>.</li> <li>▪ Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan signifikansi 5%.</li> <li>▪ Program yang digunakan adalah <i>Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver. 19.00</i>.</li> <li>▪ Teori pengendalian internal, teori komitmen organisasi, teori kecurangan (<i>fraud</i>), dan teori pengadaan barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.</li> <li>▪ Komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti memberikan saran kepada manajemen rumah sakit hendaknya lebih memperhatikan penerapan pengendalian internal di rumah sakit serta menanamkan dan menumbuhkan komitmen terhadap organisasi pada setiap karyawan yang dapat membantu upaya pencegahan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) pengadaan barang di rumah sakit.</li> <li>▪ Saran untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penambahan faktor-faktor lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang diantaranya adalah faktor kesejahteraan karyawan. Selain itu, hendaknya subjek penelitian dapat diperluas sehingga subjek penelitian tidak terbatas seperti penelitian</li> </ul>

				ini yang hanya menggunakan 5 rumah sakit saja atau penelitian lebih lanjut dapat mengganti subjek penelitian, sebagai contoh perusahaan manufaktur.
Natasya dkk. (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen organisasi</li> <li>▪ Pengendalian internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.</li> <li>▪ Populasi penelitian adalah seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit Bhayangkara TK.IV Polda Sulut yang berjumlah 178 orang.</li> <li>▪ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (angket)</li> <li>▪ Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS).</li> <li>▪ Teori akuntansi dan akuntansi manajemen, teori komitmen organisasi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap risiko kecurangan dalam pelaksanaan asuransi kesehatan.</li> <li>▪ Pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh signifikan terhadap risiko kecurangan dalam pelaksanaan asuransi kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti memberikan saran kepada manajemen rumah sakit untuk memperhatikan secara lebih detail dalam menerapkan pengendalian internal di rumah sakit serta saran agar manajemen dapat menanamkan komitmen pada organisasi terhadap setiap karyawan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di rumah sakit.</li> <li>▪ Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak berpatokan pada 2 faktor yang telah diteliti dalam penelitian ini tetapi dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mungkin dapat memberikan pengaruh pada resiko terjadinya kecurangan pelaksanaan jaminan</li> </ul>

		teori pengendalian internal, teori <i>fraud</i> , serta jaminan kesehatan dan kecurangan dalam jaminan kesehatan.		kesehatan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan subjek penelitian atau mengganti subjek penelitian dengan perusahaan manufaktur misalnya.
Udoyono (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E-procurement</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode kualitatif.</li> <li>▪ Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.</li> <li>▪ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai sumber primer dan observasi secara mendalam terhadap data seperti dokumen-dokumen berkaitan pengadaan barang dan jasa 2009 Kota Yogyakarta sebagai data sekunder.</li> <li>▪ Teknik analisis data menggunakan tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementasi <i>e-procurement</i> di Kota Yogyakarta tahun 2009 layak (<i>ficible</i>) tetapi tidak akuntabel (<i>accountable</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam jurnal penelitiannya peneliti tidak mencantumkan kelemahan dan saran penelitian yang berguna untuk penelitian selanjutnya.</li> </ul>

		<p>berbagai sumber baik primer maupun sekunder melalui wawancara mendalam dan observasi; mensistematisasikan data-data yang sudah terkumpul menjadi data yang lebih sederhana; menganalisis data yang sudah tersistematisasi menjadi sebuah hasil akhir penelitian; dan menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dianalisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teori reformasi birokrasi, teori <i>e-government</i> dan teori akuntabilitas.</li> </ul>		
Soleman (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian internal</li> <li>▪ <i>Good Corporate Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif.</li> <li>▪ Populasi penelitian adalah aparatur pemerintah pada SKPD kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.</li> <li>▪ Sampel penelitian adalah aparatur pemerintah daerah disetiap SKPD Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>.</li> <li>▪ Pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh positif terhadap <i>Good Corporate Governance</i>.</li> <li>▪ <i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh/berpengaruh positif terhadap pencegahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti memberikan saran/usulan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di seluruh kabupaten/kota untuk merancang sistem pengendalian internal secara komprehensif supaya dapat membantu mencegah terjadinya <i>fraud</i>, dan pimpinan</li> </ul>

		<p>Maluku Utara yang bertanggungjawab pada perencanaan penyusunan anggaran, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan dengan jumlah sampel 72 SKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode penarikan sampel dengan <i>purposive non random sampling</i>.</li> <li>▪ Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner.</li> <li>▪ Alat analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan program LISREL 8.80.</li> <li>▪ Teori pengendalian internal, teori <i>good corporate governance</i>, dan teori kecurangan (<i>fraud</i>).</li> </ul>	<p><i>fraud</i>.</p>	<p>hendaknya menetapkan prioritas, melakukan pengorganisasian strategi, dan mensosialisasikan kepada seluruh manajemen dan staf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain seperti asimetri informasi, external auditor, dan kompensasi.</li> </ul>
Akbar, dkk. (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementasi <i>e-procurement</i></li> <li>▪ Sistem pengendalian internal pemerintah</li> <li>▪ Budaya etis organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan didasari paradigma positif dan bersifat explanatory.</li> <li>▪ Objek penelitian ini adalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementasi <i>e-procurement</i> memiliki pengaruh/berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>.</li> <li>▪ Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh/berpengaruh terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beberapa keterbatasan penelitian yang diungkapkan peneliti diantaranya adalah lokasi penelitian hanya menggunakan satu kabupaten sehingga hasil penelitian</li> </ul>

		<p>kabupaten Lingga, kepulauan Riau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh OPD yang berada di lingkungan kabupaten Lingga.</li> <li>▪ Metode <i>sampling</i> yang digunakan dalam penelitian ini yakni <i>non-probability</i> yakni <i>purposive sampling</i>.</li> <li>▪ Sampel penelitian ini adalah 10 OPD yang terdiri dari 55 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan pengadaan.</li> <li>▪ Sumber data penelitian ini adalah data primer.</li> <li>▪ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan menggunakan kuesioner.</li> <li>▪ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>moderated regression analysis</i> (MRA).</li> </ul>	<p>pencegahan <i>fraud</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budaya etis organisasi merupakan variabel yang memoderasi pengaruh implementasi <i>e-procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.</li> </ul>	<p>kurang mampu untuk digeneralisasikan, pengumpulan data membutuhkan rentang waktu yang cukup lama, dan penelitian hanya berfokus pada etika dan sistem dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti menyarankan untuk melakukan penambahan objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, peneliti juga menyarankan pengumpulan data bagi penelitian kedepannya agar tidak dilakukan pada akhir tahun karena masing-masing OPD pasti tersita waktunya dengan berbagai aktivitas anggaran akhir tahun, serta peneliti mengharapkan adanya penambahan faktor-faktor lain seperti kompetensi pejabat hingga gaya kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi guna mendukung sistem yang telah berjalan.</li> </ul>
--	--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teori <i>e-procurement</i>, teori fraud dan <i>fraud triangle theory</i>, teori sistem pengendalian internal, teori Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), teori budaya etis organisasi, dan <i>gone theory</i>.</li> </ul>		
Nugroho dkk. (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan total biaya perolehan</li> <li>▪ Perubahan struktur organisasi</li> <li>▪ Perubahan karakteristik organisasi</li> <li>▪ Spesifikasi sistem</li> <li>▪ Manajemen pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini merupakan jenis penelitian <i>explanatory research</i>.</li> <li>▪ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</li> <li>▪ Metode survey dengan menggunakan kuesioner.</li> <li>▪ Populasi dan sampel penelitian ini adalah pengguna/operator sistem <i>e-procurement</i> di lingkup SKPD Kabupaten Magetan dengan jumlah pegawai yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab sebagai operator pelaksana sistem sebanyak 45 orang.</li> <li>▪ Data penelitian dianalisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem <i>e-procurement</i> memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peneliti menyarankan pemerintah khususnya LKPP agar meningkatkan akselerasi penerapan sistem pengadaan secara elektronik (<i>e procurement</i>), LKPP hendaknya berfokus pada variabel spesifikasi sistem untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem <i>e-procurement</i>, LKPP tetap harus memperhatikan variabel-variabel lain yang juga memiliki pengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah seperti perubahan total biaya perolehan, perubahan struktur organisasi, perubahan karakteristik</li> </ul>

		<p>dengan menggunakan alat bantu program aplikasi komputer SPSS Versi 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teori pengadaan barang/jasa pemerintah, teori pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>), dan teori <i>fraud</i> pengadaan barang / jasa pemerintah.</li> </ul>		<p>organisasi, dan manajemen pelaksanaan, serta pengadaan barang/jasa pemerintah harus diawasi dengan baik agar dapat meminimalkan tingkat terjadinya <i>fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian negara dan menjadi penghalang tercapainya kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	--	--	---





Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti menarik beberapa variabel independen (X) diantaranya adalah sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) (X1), sistem pengendalian internal (*internal control system*) (X2), komitmen organisasi (X3), dan akuntabilitas kinerja pemerintah (X4 sebagai *intervening variable*). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah pencegahan *fraud*.

### **2.3. Pencegahan *Fraud***

Budaya yang terbentuk dan berkembang dalam suatu organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat kecurangan (*fraud*) tinggi ataupun lingkungan kerja dengan tingkat kecurangan (*fraud*) rendah.

Untuk mencegah, menekan, atau meminimalkan terjadinya kecurangan (*fraud*), organisasi hendaknya menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat kecurangan (*fraud*) yang rendah. Pongsapan (2017) menjelaskan bahwa lingkungan organisasi dengan tingkat kecurangan (*fraud*) rendah dan sangat baik mencegah/untuk pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat diciptakan dengan 2 (dua) faktor dasar yaitu :

1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan pemberian dukungan
2. Mengeliminasi atau meminimalkan kesempatan/peluang terjadinya kecurangan (*fraud*)

Widiutami dkk. (2017) menjelaskan untuk meminimalkan *fraud* maka perlu adanya peningkatan efektivitas pengendalian internal, ketaatan

aturan akuntansi, dan komitmen organisasi. Pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi terkait penerapan sistem pengendalian internal sangat penting dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih baik sehingga dapat membantu upaya pemerintah dalam pencegahan *fraud*.

Pencegahan *fraud* pada penelitian adalah bagaimana *fraud* dapat ditekan dengan diterapkannya sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik diharapkan dapat mendukung/mensukseskan upaya pemerintah dalam pencegahan *fraud*.

#### **2.4. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*E-procurement*)**

Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) adalah sebuah sistem yang digunakan dalam kegiatan lelang (*tender*) pengadaan barang/jasa pemerintah dimana sistem ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Sutedi, 2012a). Sucahyo dan Ruldeviyani (2009) menyatakan sisi negatif yang dapat timbul ketika pengadaan barang dan jasa terjadi tanpa *e-procurement* antara lain adalah adanya *tender* arisan dan adanya *kickback* pada proses *tender*; adanya fenomena suap menyuap untuk memenangkan *tender*; proses *tender* tidak transparan/terbuka; pengelola

proyek tidak mengumumkan rencana *tender*; *supplier* menetapkan harga lebih tinggi (*mark up*); memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; spesifikasi teknik yang dicantumkan hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; adanya metode penunjukkan langsung dengan mengacuhkan ketentuan yang telah ditetapkan; adanya *supplier* yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat mengikuti *tender* bahkan memenangkan *tender*; dan tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya.

Pratiwi dkk. (2014) menerangkan bahwa digalakkannya *e-procurement* pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) proses lelang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat merepresentasikan keterbukaan/transparansi dan meminimalkan praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara (Sutedi, 2012b).

Guna mendukung aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik (berbasis sistem), instansi-instansi pemerintah mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE mengacu/berpedoman pada ketentuan teknis operasional/standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun layanan yang terdapat dalam sistem pengadaan barang

dan/atau jasa (*e-procurement*) instansi pemerintah saat ini adalah *e-tendering*, *e-catalogue*, *e-purchasing*, dan *e-audit*.

## **2.5. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada bagian akuntansi dan keuangan, tetapi mencakup pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan lain sebagainya (Tehupuring dan Lingga, 2017). Natasya dkk. (2017) menjabarkan bahwa pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk mengamankan harta milik/aset organisasi, bila pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik dan efektif sebagai sarana kendali, maka akan berpotensi tinggi terjadi kecurangan (*fraud*).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disusun berdasarkan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang memberikan keyakinan yang cukup bahwa penyelenggaraan aktivitas pada instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efisien dan efektif, pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, pengamanan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sari, 2012). Akbar, dkk. (2019) menjelaskan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan rangkaian sistem yang terdiri dari prosedur dan kebijakan yang kemudian diintegrasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai serta memberi jaminan kelayakan proses yang diimplementasikan oleh manajemen.

## **2.6. Komitmen Organisasi**

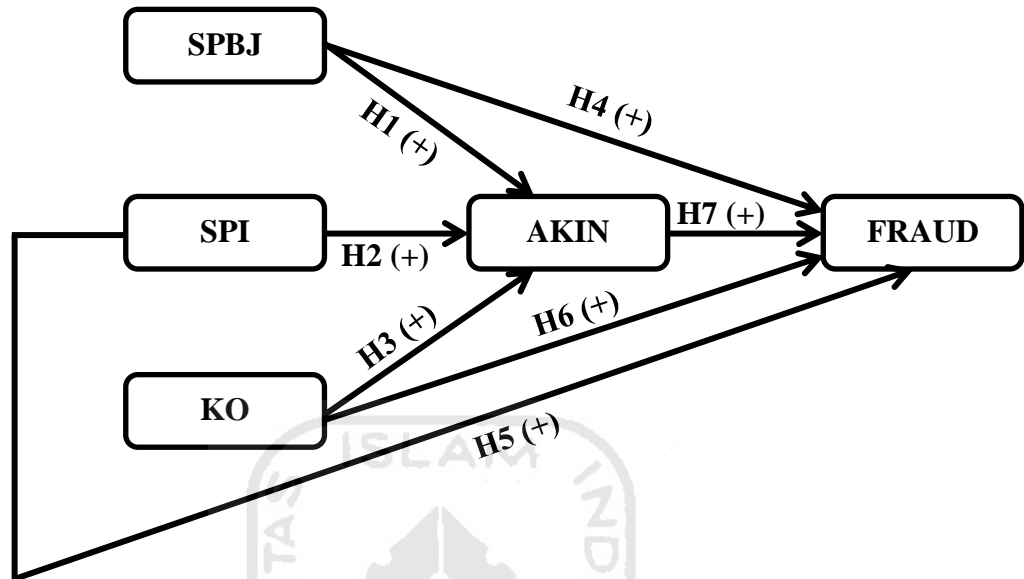
Purwitasari (2013) menyatakan komitmen organisasi diartikan sebagai kekuatan dari identifikasi dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Hal ini ditandai paling tidak dengan tiga faktor yaitu : (1) keyakinan kuat dalam penerimaan tujuan dan nilai-nilai organisasi; (2) kesediaan untuk mengeluarkan daya dan upaya yang cukup besar atas nama organisasi; dan (3) keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Widiutami dkk. (2017) yang menyatakan komitmen organisasi dapat diwujudkan apabila setiap orang dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.

## **2.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 29 Tahun 2014, diartikan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang telah dimandatkan oleh pemangku kepentingan sehubungan dengan pencapaian misi organisasi yang diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang tersusun secara periodik (Dewi dkk., 2017a).

## 2.8. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

## 2.9. Pengembangan Hipotesis Penelitian

### 2.9.1. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

*Fraud* membawa desakan/tuntutan bagi pemerintah selaku agen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan (*public governance*) yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik harus dilandasi dengan kesadaran, komitmen tinggi, dan juga konsistensi. Berdasarkan teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*), upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (e-

*procurement*) yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) ini dipercaya menjadi salah satu cara ampuh yang dapat membantu menjembatani terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebaliknya, sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) yang tidak diterapkan dengan baik dapat menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian Udoyono (2012) menunjukkan bahwa *e-procurement* dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas adalah layak (*ficible*) tetapi akuntabel (*accountable*). Hasil penelitian Udoyono (2012) sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2013), Rahadian dan Gapur (2015), dan Heriawati (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H1: Sistem pengadaan barang dan/atau jasa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah*

## **2.9.2. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila akuntabilitas kinerja pemerintah telah baik. Terdapat beberapa indikator/parameter yang bisa dipergunakan sebagai tolak ukur baik buruknya akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah baik pada umumnya ditandai dengan kepatuhan dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan pada organisasi, budaya etis organisasi yang baik, profesionalisme dan komitmen organisasi yang tinggi, serta sistem pengendalian internal organisasi yang baik. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sedangkan sistem pengendalian internal yang buruk dapat menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian Arifin (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh/berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi publik. Senada dengan hasil penelitian Arifin (2014), hasil penelitian Wulansari (2014) dan Jayatri (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:



*H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah*

### **2.9.3. Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

*Fraud* pengadaan barang/jasa sektor pemerintahan mayoritas terjadi di negara berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan dan/atau pengawasan terhadap sistem dan kinerja pemerintahan negara berkembang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara maju. Lemahnya pengelolaan dan/atau pengawasan terhadap sistem dan kinerja pemerintahan dapat memberikan celah/membuka peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*) menjabarkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (*public governance*) yang baik diperlukan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu salah satunya dengan membangun/membentuk komitmen organisasi pada instansi pemerintah. Komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebaliknya, komitmen organisasi yang rendah dapat menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian Amrullah (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, membantu unit kerja untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Amrullah (2018) sejalan dengan hasil

penelitian Silvia (2013) dan Jayatri (2015) yang menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H3: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah*

#### **2.9.4. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), *fraud* dapat terjadi ketika ada kesempatan/peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Buruknya pengelolaan dan/atau pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa konservatif/konvensional memberikan peluang lebih besar bagi oknum aparatur sipil untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dibandingkan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sebuah sistem yang terintegrasi. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan upaya pencegahan *fraud*. Sebaliknya, sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) yang tidak diterapkan dengan baik dapat menghambat upaya pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian Udoyono (2012) menunjukkan peran *e-procurement* berdampak pada penghematan anggaran daerah, menciptakan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang efektif dan efisien, menghasilkan peningkatan kualitas administrasi dan terciptanya *database*

pengadaan barang dan/atau jasa yang baik, serta sarana memperkecil ruang bagi para pelaku kecurangan. Hasil penelitian Udoyono (2012) sejalan dengan hasil penelitian Artantri dkk. (2016), Danuta (2016), Danuta (2017), Akbar dkk. (2019), Lintangari dkk. (2017), Nugroho dkk. (2015) yang menunjukkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H4: Sistem pengadaan barang dan/atau jasa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud*

#### **2.9.5. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud***

Sistem pengendalian internal memiliki keterkaitan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), *fraud* dimungkinkan terjadi apabila terdapat kesempatan / peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Besar kecilnya peluang terjadinya *fraud* salah satunya dipengaruhi oleh baik atau buruknya sistem pengendalian internal yang diterapkan pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kewaspadaan organisasi terhadap segala bentuk penyimpangan dalam upaya pencegahan *fraud*. Sebaliknya, sistem pengendalian internal yang buruk dapat menurunkan kewaspadaan organisasi terhadap segala bentuk penyimpangan dalam upaya pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian Purwitasari (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa. Hasil penelitian Purwitasari (2013) sejalan dengan hasil penelitian Akbar dkk. (2019), Lintang Sari dkk. (2017), Soleman (2013), Dewi dkk. (2017b), dan Natasya dkk. (2017). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H5: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud*

#### **2.9.6. Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud***

Julia (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki keterikatan/komitmen terhadap organisasi apabila memiliki keyakinan dan menerima nilai-nilai serta tujuan organisasi, bersedia mengerahkan upaya demi mencapai tujuan organisasi, dan berkeinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan dengan cara mempersempit ruang gerak dan memperkecil peluang pelaku untuk melakukan *fraud* salah satunya yaitu menciptakan lingkungan kerja dengan komitmen organisasi tinggi. Dengan kata lain, komitmen organisasi dipercaya dapat membantu instansi pemerintah dalam melakukan deteksi dini, meminimalkan peluang, dan mencegah terjadinya *fraud*. Seseorang yang memiliki keterikatan/komitmen tinggi terhadap organisasi pada umumnya tidak

akan melakukan perilaku-perilaku menyimpang untuk kepentingan dan tujuan pribadi yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keterikatan/komitmen rendah terhadap organisasi pada umumnya cenderung akan melakukan perilaku-perilaku menyimpang untuk kepentingan dan tujuan pribadi yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Hasil penelitian Purwitasari (2013) menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa. Hasil penelitian Purwitasari (2013) sejalan dengan hasil penelitian Natasya dkk. (2017) yang menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh / berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H6: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud*

#### **2.9.7. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud***

Akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki keterkaitan dengan pencegahan *fraud*. Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) dan teori tata kelola pemerintahan (*public governance theory*), tata kelola pemerintahan (*public governance*) yang baik dapat mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan/mencegah terjadinya *fraud*. Tata kelola pemerintahan (*public governance*) yang baik dapat tercipta apabila instansi pemerintah telah memiliki akuntabilitas kinerja pemerintah yang

baik. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat/potensi terjadinya *fraud* rendah diperlukan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Akuntabilitas kinerja pemerintah baik dapat membantu upaya pencegahan *fraud*. Sebaliknya, akuntabilitas kinerja pemerintah buruk dapat menghambat upaya pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian Santoso dan Pambelum (2008) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kontrol kualitas laporan keuangan pemerintah akan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja unit pemerintah dan berpengaruh pada upaya mereka untuk menghindari dan mencegah *fraud*. Hasil penelitian Santoso dan Pambelum (2008) sejalan dengan hasil penelitian Nurlina dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintahan memiliki pengaruh/berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan (*fraud*) sejak awal/sejak dini sebagai upaya pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

*H7: Akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode dan Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*), sistem pengendalian internal (*internal control system*), dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* dengan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel *intervening*.

#### **3.2. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dapat didefinisikan sebagai seluruh kelompok orang (manusia), kejadian, atau hal-hal yang memikat peneliti dimana peneliti menjadi tergerak untuk melakukan penelitian/investigasi dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di kabupaten/kota serta provinsi D.I. Yogyakarta yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di masing-masing lembaga.

Populasi penelitian dipilih peneliti dengan pertimbangan beberapa hal diantaranya adalah kesesuaian dengan topik penelitian, penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta, keterjangkauan wilayah penelitian,

dan masih sedikitnya penelitian dengan topik sejenis yang menggunakan populasi aparatur Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di kabupaten/kota serta provinsi D.I. Yogyakarta yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di masing-masing lembaga.

Penghargaan yang diraih pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana dikutip dari *website* resmi Provinsi D.I. Yogyakarta, Humas (2020) menjelaskan bahwa D.I. Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat AA (terbaik) pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III selama 2 tahun berturut-turut yakni di tahun 2018 dan 2019. Penghargaan selanjutnya dikutip dari *website* resmi LPSE Provinsi D.I. Yogyakarta, Admin (2011) menjelaskan LPSE Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2011 meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP RI) sebagai LPSE Motivator.

Dikutip dari *website* resmi Antara News, Arifa (2015) menjelaskan penghargaan diraih oleh LPSE Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP RI) dalam *National Procurement Award* untuk kategori kepemimpinan pada Transformasi Pengadaan Secara Elektronik dan LPSE ini juga merupakan LPSE pertama yang didirikan di Indonesia yaitu didirikan pada tahun 2008. Penghargaan juga diraih oleh Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dikutip dari *website* resmi LPSE Kulon Progo, Admin (2018)



menerangkan bahwa LPSE Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 turut serta meraih penghargaan dalam *National Procurement Award* untuk kategori Komitmen 100% *E-Procurement*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *sampling*. Hal ini berarti tidak semua melainkan hanya sebagian dari keseluruhan populasi yang diteliti pada penelitian ini. Sampel merupakan bagian dari populasi dimana berdasarkan sampel tersebut peneliti akan menarik kesimpulan hasil penelitian dan mengeneralisasikan kesimpulan tersebut ke populasi (Sekaran dan Bougie, 2016). Proses *sampling* penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* dengan 85 sampel penelitian (responden) agar hasil penelitian diharapkan dapat digeneralisasikan. Ukuran sampel penelitian sebesar 85 sampel penelitian ditentukan berdasarkan salah satu usulan aturan praktis yang terdapat dalam Sekaran dan Bougie (2016) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel wajib beberapa kali (lebih diminati sepuluh kali atau lebih) dari jumlah/total variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel penelitian sehingga ukuran sampel minimal adalah 50 sampel penelitian.

*Purposive sampling method* sendiri didefinisikan sebagai salah satu teknik *sampling* yang mendasarkan pada beberapa kriteria tertentu dalam proses pemilihan sampel. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini mengacu pada penelitian Nurlina dkk. (2018) dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini sehingga menghasilkan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai yang memiliki sertifikasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa
2. Pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa minimal 1 bulan walaupun tidak bersertifikasi

### **3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer dapat diartikan bahwa data penelitian didapatkan melalui kontak langsung antara peneliti dengan responden tanpa melalui perantara. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner yang disebarakan kepada responden memuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis/terstruktur oleh peneliti untuk meneliti variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

#### **3.3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyerahkan kuesioner secara langsung kepada aparatur Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di kabupaten/kota serta provinsi D.I. Yogyakarta yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner tersebut memuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis/terstruktur oleh peneliti kemudian selanjutnya peneliti akan meminta kesediaan para

responden untuk mengisi jawaban pada daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner sesuai dengan kondisi/realitas yang ada.

### **3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

#### **3.4.1. Pencegahan *Fraud* (Y)**

Pencegahan *fraud* merupakan upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan tujuan untuk menghalau/mencegah, menekan, atau meminimalkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya *fraud* (Akbar dkk., 2019). Pencegahan *Fraud* (Y) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Pongsapan, 2017).

#### **3.4.2. Sistem Pengadaan Barang dan / atau Jasa (X1)**

Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan untuk mencapai/mewujudkan suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi (Purwanto, 2008). Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa (X1) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Heriawati (2018).

#### **3.4.3. Sistem Pengendalian Internal (X2)**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mampu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Dewi dkk., 2017a). Sistem Pengendalian Internal (X2) dalam

penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nugraha (2018) dan Najahningrum (2013).

#### **3.4.4. Komitmen Organisasi (X3)**

Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang atau pegawai mengenal dan memiliki keterikatan pada organisasi tempatnya bekerja (Rimata, 2014). Komitmen Organisasi (X3) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Najahningrum (2013).

#### **3.4.5. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (X4)**

Akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk nyata pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimandatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dimana pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban instansi pemerintah (Dewi dkk., 2017a). Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (X4) dalam penelitian ini diperlakukan sebagai variabel *intervening*. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (X4) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Heriawati (2018).

Variabel - variabel yang tersebut diatas digunakan dalam penelitian ini dan diukur menggunakan skala *Likert* dengan metode pemberian skor (*scoring*). Metode pemberian skor (*scoring*) dibagi menjadi 5 kategori skor yaitu jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1, tidak setuju diberikan skor 2, netral diberikan skor 3, setuju diberikan skor 4, dan sangat setuju diberikan skor 5.

### **3.5. Teknik Pengujian Hipotesis**

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Sugiyono (2007) menjelaskan statistik deskriptif adalah statistik yang dipergunakan untuk analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa berniat untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian secara umum atau generalisasi. Sedangkan Rimata (2014) menyatakan bahwa statistik deskriptif dipergunakan untuk analisis data dan menyajikan data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.

#### **3.5.2. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Validitas adalah syarat/ketentuan yang dibutuhkan tetapi tidak cukup untuk menguji kebaikan suatu ukuran (Sekaran dan Bougie, 2016). Rimata (2014) menyatakan uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna memastikan kemampuan dari skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah poin-poin yang tercantum dalam kuesioner benar-

benar mampu/sanggup mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Rimata, 2014). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *construct validity* menggunakan dua metode yaitu *convergent validity* and *discriminant validity*.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan bahwa reliabilitas (keandalan) pengukuran memperlihatkan sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan) dan memastikan pengukuran yang sama/konsisten sepanjang waktu dan diberbagai poin dalam *instrument*. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa keandalan suatu ukuran merupakan sebuah indikasi stabilitas serta konsistensi dimana *instrument* mengukur konsep dan memudahkan menilai kebaikan dari suatu ukuran. Ghozali (2011) menjelaskan bahwa kuesioner dinyatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten, stabil, atau sama dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diuji dengan menggunakan *composite reliability* yaitu dengan melihat nilai dari *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat disebut *reliable* apabila variabel tersebut memberikan nilai korelasi atau nilai *cronbach alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2011). Namun, nilai korelasi  $> 0,6$  dalam penelitian yang menggunakan pendekatan eksploratori masih dianggap *reliable*/dianggap memadai. (Ghozali dan Latan, 2015).

### 3.5.3. R-Square, F-Square, dan Q-Square

Rimata (2014) menjelaskan koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model mampu menerangkan variasi dari variabel-variabel dependen. Koefisien determinasi (R-Square) memiliki nilai antara nol hingga satu. Nilai R-Square ( $R^2$ ) yang kecil dapat diartikan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas sedangkan apabila nilai R-Square ( $R^2$ ) mendekati satu dapat diartikan variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menerangkan variasi variabel dependen (Rimata, 2014).

Pengujian *Effect Size/F-Square* ( $F^2$ ) dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Ghazali dan Latan (2015) menyatakan bahwa nilai *Effect Size/F-Square* ( $F^2$ ) adalah 0,02 (kecil); 0,15 (menengah); dan 0,35 (kuat). Pengujian *Prediction Relevance* (Q-Square) dilakukan untuk mengetahui kapabilitas/relevansi prediktif. Besaran Q-Square ( $Q^2$ ) mempunyai rentang nilai  $0 < Q^2 < 1$ . Dapat diartikan bahwa nilai Q-Square ( $Q^2$ ) semakin besar dan mendekati 1 adalah semakin baik.

### 3.5.4. Uji Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan program *Partial Least Square* (Smart-PLS). Hasil penelitian dinyatakan berpengaruh positif jika koefisien regresi masing-masing variabel bernilai positif. Sebaliknya, hasil penelitian dinyatakan berpengaruh negatif jika koefisien regresi masing-masing variabel bernilai negatif. Selain itu,

penelitian dapat dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05.





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh dari variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) sebagai X1, sistem pengendalian internal (*internal control system*) sebagai X2, dan komitmen organisasi sebagai X3 terhadap variabel dependen Y pencegahan *fraud* dengan variabel *intervening* akuntabilitas kinerja pemerintah.

Objek penelitian ini adalah aparatur kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di masing-masing lembaga. Sampel penelitian yang terkumpul dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 85 sampel penelitian (85 orang aparatur sipil yang memenuhi kriteria pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling method*). 85 sampel penelitian ini dinilai telah representatif karena telah memenuhi minimal jumlah sampel sebanyak 50 sampel penelitian berdasarkan salah satu usulan aturan praktis yang terdapat dalam Sekaran dan Bougie (2016) sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Analisis data dilakukan dengan dua analisis yaitu analisis deskriptif tentang biografi responden penelitian dan analisis data melalui *Structural*

*Equation Modelling* (SEM). Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS) melalui bantuan *software* Smart-PLS versi 3.2.7.

#### 4.2. Daftar Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE

Berikut adalah daftar Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta yang menjadi subjek penelitian dan bertugas menangani proses pengadaan barang dan/atau jasa di pemerintahan seperti yang ditunjukkan pada table 4.1:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di Kabupaten/Kota serta Provinsi D.I. Yogyakarta**

No	Nama Kantor	Alamat Kantor
1.	Bagian Layanan Pengadaan Provinsi D.I. Yogyakarta termasuk didalamnya LPSE Provinsi D.I. Yogyakarta	Jalan Komplek Kepatihan Lantai 3 Unit 7, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55213
2.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman termasuk didalamnya LPSE Kabupaten Sleman	Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, 55511

3.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo termasuk didalamnya LPSE Kabupaten Kulon Progo	Jalan Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, 55611
4.	Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul termasuk didalamnya LPSE Kabupaten Bantul	Komplek Perkantoran II Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding
5.	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul termasuk didalamnya LPSE Kabupaten Gunungkidul	Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 55813
6.	Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta termasuk didalamnya LPSE Kota Yogyakarta	Komplek Balaikota Pemerintah Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165

Berdasarkan uraian tabel 4.1 diatas terdapat 4 kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di kabupaten, 1 kantor BLP dan LPSE di kotamadya, dan 1 kantor BLP dan LPSE di provinsi yang turut serta menjadi responden penelitian dengan melakukan pengisian kuesioner.

#### **4.3. Klasifikasi Responden Penelitian**

Klasifikasi responden dalam penelitian ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 kriteria penggolongan yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan

tingkat pendidikan terakhir. Akan tetapi, sebagian besar (mayoritas) dari responden penelitian tidak mencantumkan data pendidikan terakhir pada isian kuesioner sehingga peneliti hanya dapat membagi penelitian ke dalam 2 kriteria penggolongan yaitu berdasarkan jenis kelamin dan usia.

#### 4.3.1. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah data penggolongan responden penelitian berdasarkan jenis kelamin yang ditunjukkan pada Tabel 4.2:

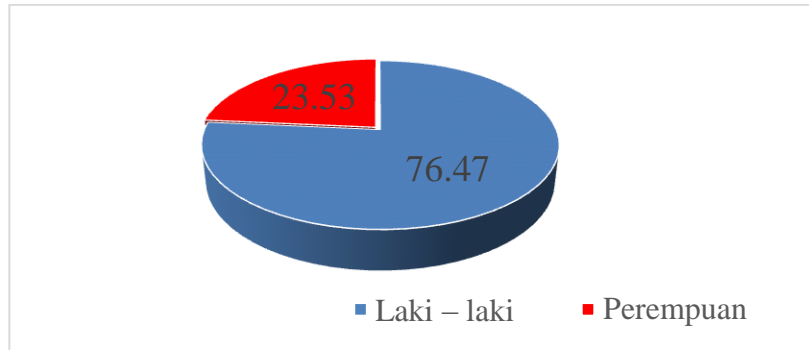
**Tabel 4.2**  
**Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	65	76,47
Perempuan	20	23,53
TOTAL	85	100

*Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diamati bahwa responden penelitian yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan responden yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 65 orang atau 76,47% dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 20 orang atau 23,53%. Persentase penggolongan responden penelitian berdasarkan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.1**  
**Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin**



*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2020*

**4.3.2. Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Usia**

Berikut adalah data penggolongan responden penelitian berdasarkan usia yang ditunjukkan pada tabel 4.3:

**Tabel 4.3**  
**Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Usia**

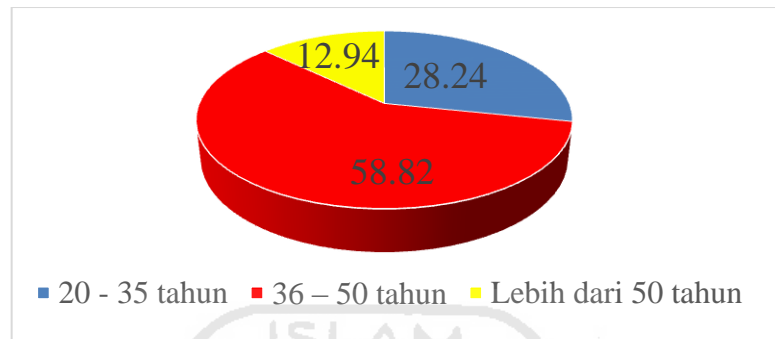
Rentang Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20-35 tahun	24	28,24
36–50 tahun	50	58,82
Lebih dari 50	11	12,94
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diamati bahwa responden penelitian paling dominan/mayoritas yaitu responden berusia 36–50 tahun yang berjumlah 50 orang atau 58,82%, responden berusia 20–35 tahun yang berjumlah 24 orang atau 28,24%, dan responden berusia lebih dari 50 tahun dengan jumlah paling sedikit/minoritas yaitu 11 orang atau 12,94%.

Persentase penggolongan responden penelitian berdasarkan usia dapat dilihat lebih jelas pada grafik di bawah ini:

**Grafik 4.2**  
**Penggolongan Responden Penelitian Berdasarkan Usia**



Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2020

#### 4.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu metode SEM berbasis PLS dengan memanfaatkan alat bantu berupa *software* Smart-PLS versi 3.2.7. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan yaitu menggunakan analisis model pengukuran (*outer model*) dan analisis model struktural (*inner model*).

##### 4.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipergunakan untuk analisis data mengacu pada jawaban-jawaban responden yang dijadikan sampel penelitian terhadap tiap-tiap indikator pengukuran variabel. Di bawah ini tersaji tabel statistik deskriptif:

**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA	85	3.38	5.00	4.3779	.45886
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	85	2.50	5.00	4.2647	.47771
KOMITMEN ORGANISASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH	85	1.00	5.00	3.8659	.66843
PENCEGAHAN FRAUD	85	2.09	5.00	4.1016	.50682
Valid N (listwise)	85			4.0176	.57821

*Sumber : Output Smart-PLS, 2020*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diamati bahwa variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa (SPBJ) memiliki batas bawah (nilai minimum) sebesar 3,38 sampai dengan batas atas (nilai maksimum) sebesar 5,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,3779 dan standar deviasi sebesar 0,45886. Nilai standar deviasi memperlihatkan adanya penyimpangan sebesar 0,45886 dari rata-rata (mean) jawaban responden penelitian tentang sistem pengadaan barang dan/atau jasa (SPBJ) sebesar 4,3779.

Variabel sistem pengendalian internal (SPI) memiliki batas bawah (nilai minimum) sebesar 2,50 sampai dengan batas atas (nilai maksimum) sebesar 5,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,2647 dan standar deviasi sebesar 0,47771. Nilai standar deviasi memperlihatkan adanya penyimpangan sebesar 0,47771 dari rata-rata (mean) jawaban responden penelitian tentang sistem pengendalian internal (SPI) sebesar 4,2647.

Variabel komitmen organisasi (KO) memiliki batas bawah (nilai minimum) sebesar 1,00 sampai dengan batas atas (nilai maksimum) sebesar 5,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,8659 dan standar deviasi sebesar 0,66843. Nilai standar deviasi memperlihatkan adanya penyimpangan sebesar 0,66843 dari rata-rata (mean) jawaban responden penelitian tentang komitmen organisasi (KO) sebesar 3,8659.

Variabel akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIN) memiliki batas bawah (nilai minimum) sebesar 2,09 sampai dengan batas atas (nilai maksimum) sebesar 5,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,1016 dan standar deviasi sebesar 0,50682. Nilai standar deviasi memperlihatkan adanya penyimpangan sebesar 0,50682 dari rata-rata (mean) jawaban responden penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIN) sebesar 4,1016.

Variabel pencegahan *fraud* (FRAUD) memiliki batas bawah (nilai minimum) sebesar 2,50 sampai dengan batas atas (nilai maksimum) sebesar 5,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,0176 dan standar deviasi sebesar 0,57821. Nilai standar deviasi memperlihatkan adanya penyimpangan sebesar 0,57821 dari rata-rata (mean) jawaban responden penelitian tentang pencegahan *fraud* (FRAUD) sebesar 4,0176.

#### **4.4.2. Penilaian Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Model pengukuran (*outer model*) adalah model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel–variabel laten penelitian. Pada penelitian ini digunakan 3 kriteria dalam penilaian *outer model* dan



menggunakan alat bantu berupa *software* Smart-PLS versi 3.2.7. Adapun 3 kriteria yang dimaksudkan adalah *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

**a) *Convergent Validity***

*Convergent validity* adalah salah satu dari 3 kriteria dalam analisis data menggunakan *software* Smart-PLS versi 3.2.7. *Convergent validity* pada suatu model pengukuran (*measurement model*) dapat diamati berdasarkan korelasi antara *score* indikator dengan *score* konstruk/variabel (Ghozali dan Latan, 2015). Indikator dinilai/dianggap *reliable* apabila nilai korelasi yang dimiliki  $> 0,7$  namun nilai korelasi 0,5 sampai dengan 0,6 dalam penelitian tahap awal pengembangan skala pengukuran atau penelitian pada bidang yang belum banyak dikembangkan masih bisa diterima atau masih dianggap memadai (Ghozali dan Latan, 2015).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ghozali dan Latan (2015), maka penelitian ini menggunakan batas *loading factor* sebesar 0,5. Oleh karena itu, indikator-indikator dikategorikan *reliable* jika mempunyai nilai korelasi  $> 0,5$ . Di bawah ini tersaji hasil dari pengujian *convergent validity* berdasarkan model pengukuran (*measurement model*) yang telah dirancang:



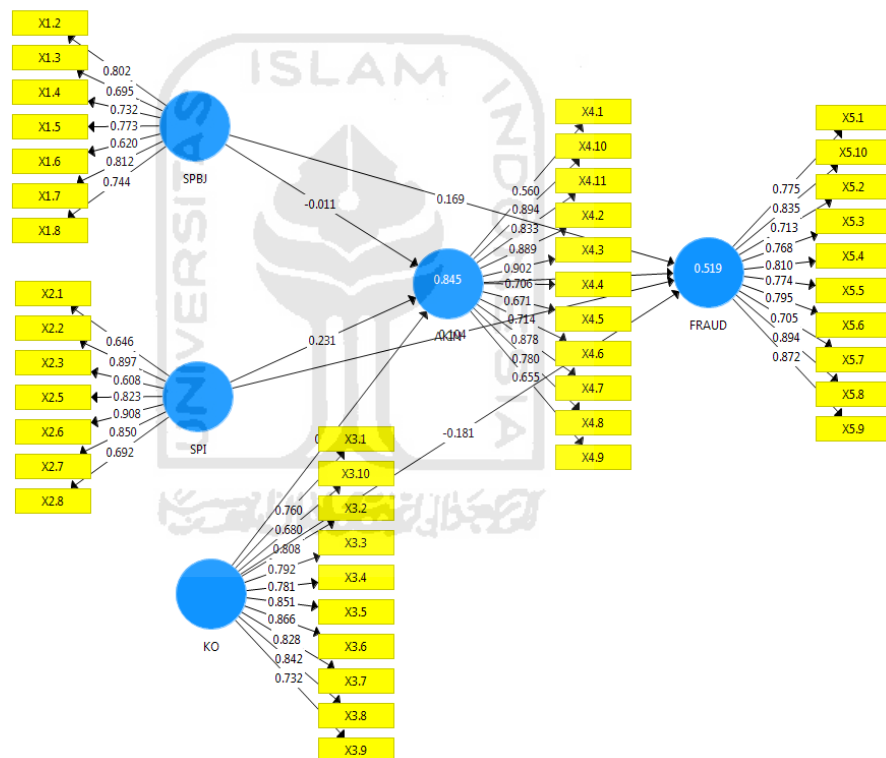
Sumber : Output Smart-PLS, 2020

**Gambar 4.1**  
**Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor**

Gambar 4.1 adalah diagram jalur dan nilai *loading factor* untuk tiap-tiap indikator. Pada gambar 4.1 dapat diamati bahwa terdapat 2 indikator yang mempunyai nilai *loading factor* < 0,5. Adapun indikator tersebut adalah SPBJ1 dengan nilai 0,486 dan SPI4 dengan nilai 0,492. Mengacu pada kriteria pengujian yang dikemukakan oleh Ghozali dan Latan (2015), maka 2 indikator yaitu SPBJ1 dan SPI4 yang mempunyai nilai *loading factor* < 0,5 harus dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian kembali untuk memastikan apakah di

pengujian kedua masih terdapat indikator yang mempunyai nilai *loading factor* < 0,5.

Di bawah ini tersaji hasil pengujian kembali dari model pengukuran setelah dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan 2 indikator (SPBJ1 dan SPI4) dari model dikarenakan 2 indikator tersebut mempunyai nilai *loading factor* < 0,5:



Sumber : Output Smart-PLS, 2020

**Gambar 4.2**  
**Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat diamati *loading factor* tiap-tiap indikator kini semuanya mempunyai nilai korelasi > 0,5.

Hasil pada gambar 4.2 dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel *Outer Loadings (Measurement Model)* di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Nilai Outer Loadings (Measurement Model)**

	<b>SPBJ</b>	<b>SPI</b>	<b>KO</b>	<b>AKIN</b>	<b>FRAUD</b>	<b>KET</b>
SPBJ2	0,802					Valid
SPBJ3	0,695					Valid
SPBJ4	0,732					Valid
SPBJ5	0,773					Valid
SPBJ6	0,620					Valid
SPBJ7	0,812					Valid
SPBJ8	0,744					Valid
SPI1		0,646				Valid
SPI2		0,897				Valid
SPI3		0,608				Valid
SPI5		0,823				Valid
SPI6		0,908				Valid
SPI7		0,850				Valid
SPI8		0,692				Valid
KO1			0,760			Valid
KO2			0,808			Valid
KO3			0,792			Valid
KO4			0,781			Valid
KO5			0,851			Valid
KO6			0,866			Valid
KO7			0,828			Valid
KO8			0,842			Valid
KO9			0,732			Valid
KO10			0,680			Valid
AKIN1				0,560		Valid
AKIN2				0,889		Valid
AKIN3				0,902		Valid
AKIN4				0,706		Valid
AKIN5				0,671		Valid
AKIN6				0,714		Valid
AKIN7				0,878		Valid
AKIN8				0,780		Valid
AKIN9				0,655		Valid
AKIN10				0,894		Valid
AKIN11				0,833		Valid
FRAUD1					0,775	Valid
FRAUD2					0,713	Valid

FRAUD3					0,768	Valid
FRAUD4					0,810	Valid
FRAUD5					0,774	Valid
FRAUD6					0,795	Valid
FRAUD7					0,705	Valid
FRAUD8					0,894	Valid
FRAUD9					0,872	Valid
FRAUD10					0,835	Valid

Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020

Berdasarkan uraian tabel 4.5 diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa tiap-tiap indikator memberikan nilai *outer loading* > 0,5. Hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa data valid atau mampu memenuhi kriteria *convergent validity*.

**b) *Discriminant Validity***

Kriteria *discriminant validity* dapat disebut terpenuhi jika variabel potensial memprediksi indikator pada grup mereka lebih baik/mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan indikator di grup lainnya (Ghozali dan Latan, 2015). *Discriminant validity* model penelitian dapat diuji dengan mengamati nilai *cross loading* untuk tiap-tiap indikator. *Discriminant validity* dikategorikan telah terpenuhi apabila nilai *cross loadings* tiap-tiap indikator variabel yang dituju lebih besar dibandingkan nilai *cross loadings* variabel lain dalam model. Di bawah ini tersaji tabel yang memuat nilai *cross loadings* berdasarkan model penelitian yang telah dirancang:

**Tabel 4.6**  
**Nilai Cross Loadings (Discriminant Validity)**

	<b>SPBJ</b>	<b>SPI</b>	<b>KO</b>	<b>AKIN</b>	<b>FRAUD</b>
SPBJ2	0,802	0,593	0,534	0,543	0,419
SPBJ3	0,695	0,542	0,507	0,442	0,359
SPBJ4	0,732	0,449	0,394	0,424	0,302
SPBJ5	0,773	0,543	0,568	0,557	0,493
SPBJ6	0,620	0,285	0,317	0,302	0,219
SPBJ7	0,812	0,557	0,475	0,451	0,513
SPBJ8	0,744	0,430	0,328	0,277	0,363
SPI1	0,589	0,646	0,411	0,436	0,521
SPI2	0,536	0,897	0,717	0,682	0,549
SPI3	0,625	0,608	0,429	0,402	0,530
SPI5	0,555	0,823	0,678	0,683	0,412
SPI6	0,526	0,908	0,751	0,757	0,464
SPI7	0,584	0,850	0,687	0,669	0,466
SPI8	0,334	0,692	0,654	0,727	0,500
KO1	0,461	0,658	0,760	0,662	0,424
KO2	0,451	0,680	0,808	0,732	0,570
KO3	0,453	0,586	0,792	0,696	0,501
KO4	0,570	0,635	0,781	0,666	0,452
KO5	0,555	0,717	0,851	0,777	0,555
KO6	0,592	0,735	0,866	0,802	0,514
KO7	0,455	0,535	0,828	0,790	0,559
KO8	0,561	0,751	0,842	0,779	0,466
KO9	0,516	0,615	0,732	0,686	0,491
KO10	0,300	0,479	0,680	0,618	0,426
AKIN1	0,401	0,351	0,448	0,560	0,509
AKIN2	0,484	0,746	0,810	0,889	0,575
AKIN3	0,508	0,709	0,851	0,902	0,545
AKIN4	0,498	0,595	0,655	0,706	0,475
AKIN5	0,596	0,554	0,580	0,671	0,739
AKIN6	0,336	0,552	0,667	0,714	0,421
AKIN7	0,432	0,743	0,816	0,878	0,492
AKIN8	0,362	0,612	0,730	0,780	0,495
AKIN9	0,528	0,517	0,532	0,655	0,581
AKIN10	0,418	0,709	0,804	0,894	0,652
AKIN11	0,557	0,759	0,795	0,833	0,515
FRAUD1	0,402	0,344	0,366	0,448	0,775
FRAUD2	0,379	0,266	0,292	0,363	0,713
FRAUD3	0,372	0,455	0,375	0,410	0,768
FRAUD4	0,376	0,491	0,436	0,449	0,810
FRAUD5	0,392	0,668	0,691	0,749	0,774
FRAUD6	0,401	0,677	0,713	0,754	0,795

FRAUD7	0,422	0,424	0,404	0,484	0,705
FRAUD8	0,522	0,488	0,497	0,580	0,894
FRAUD9	0,496	0,476	0,507	0,617	0,872
FRAUD10	0,462	0,494	0,479	0,494	0,835

Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diamati bahwa nilai *cross loadings* dari tiap-tiap indikator variabel yang dituju lebih besar dari dibandingkan nilai *cross loadings* variabel lain dalam model.

Adapun cara lain untuk menilai terpenuhi atau tidaknya kriteria *discriminant validity* adalah dengan mengamati nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Square Root Average Variance Extracted* ( $\sqrt{\text{AVE}}$ ). Model dapat dikategorikan memenuhi kriteria *discriminant validity* apabila AVE tiap-tiap konstruk (variabel) bernilai  $> 0,5$  dan  $\sqrt{\text{AVE}}$  untuk tiap-tiap konstruk (variabel) laten/potensial lebih besar dari nilai korelasi antara konstruk (variabel) dan konstruk (variabel) lainnya. Di bawah ini tersaji tabel yang memuat nilai AVE dan  $\sqrt{\text{AVE}}$  untuk tiap – tiap konstruk (variabel) :

**Tabel 4.7**  
Nilai AVE dan  $\sqrt{\text{AVE}}$

Konstruk (Variabel)	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$
SPBJ	0,551	0,742
SPI	0,614	0,783
KO	0,633	0,796
AKIN	0,607	0,779
FRAUD	0,634	0,796

Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020

Pada tabel 4.7 diatas dapat diamati dengan jelas AVE untuk tiap-tiap konstruk (variabel) mempunyai nilai  $> 0,5$  dan  $\sqrt{\text{AVE}}$  untuk

tiap–tiap konstruk (variabel) mempunyai nilai lebih besar dari korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya yang terdapat dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian nilai *cross loading* untuk masing-masing indikator serta nilai AVE dan nilai  $\sqrt{AVE}$  untuk tiap–tiap konstruk (variabel) yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa kriteria *discriminant validity* telah terpenuhi.

c) ***Composite Reliability***

Selain dilakukan pengujian *convergent validity* dan *discriminant validity*, pengujian terakhir yang dilakukan dalam *analisis outer model* adalah pengujian *composite reliability*. *Composite reliability* merupakan metode yang digunakan untuk penilaian reliabilitas terhadap konstruk (variabel) yang diukur. Konstruk (variabel) dianggap *reliable* apabila mempunyai nilai *composite reliability* maupun nilai *cronbach alpha* > 0,7. Di bawah ini tersaji tabel nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach alpha* tiap–tiap konstruk (variabel):

**Tabel 4.8**  
**Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability**

<b>Konstruk/Variabel</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>
SPBJ	0,864	0,895
SPI	0,890	0,916
KO	0,935	0,945
AKIN	0,932	0,943
FRAUD	0,936	0,945

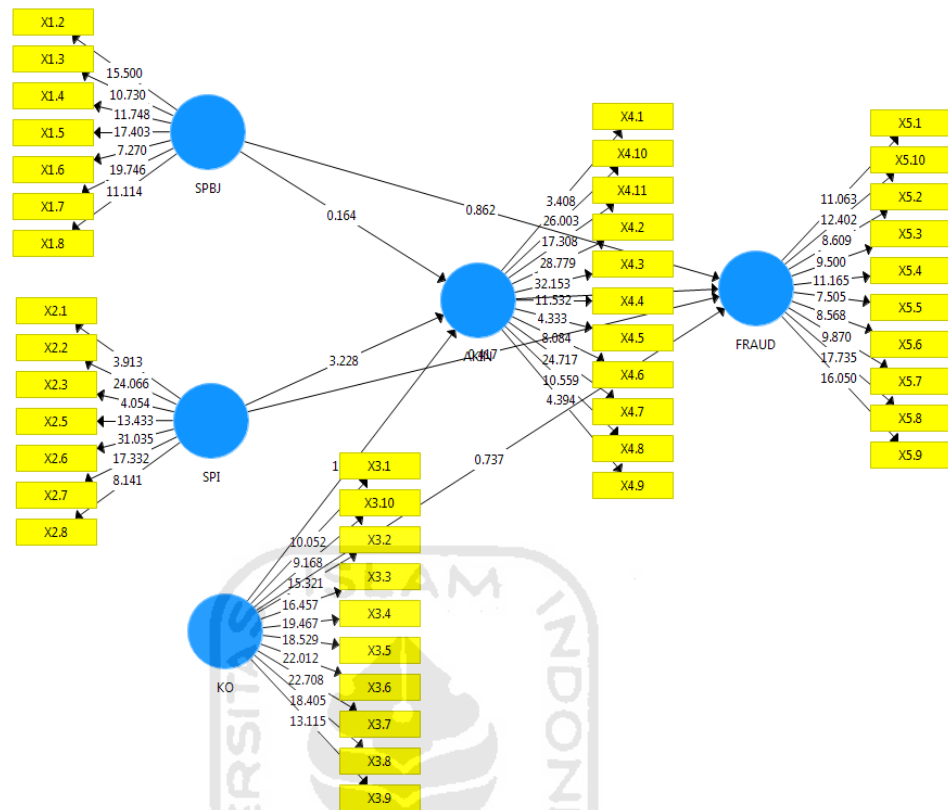
Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020



Berdasarkan uraian tabel 4.8 di atas dapat terlihat jelas bahwa nilai *composite reliability* maupun nilai *cronbach alpha* tiap-tiap konstruk (variabel)  $> 0,7$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa konstruk (variabel) yang ada dalam penelitian ini mempunyai reliabilitas memadai (reliable) karena kriteria *composite reliability* telah terpenuhi.

#### **4.4.3. Penilaian Model Struktural (*Inner Model*)**

Setelah dilakukan serangkaian analisis model pengukuran (*outer model*), maka analisis berikutnya yang dilakukan adalah analisis model struktural (*inner model*). Analisis model struktural (*inner model*) adalah model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. Analisis ini dilakukan dengan mengamati nilai *loading factor* antara konstruk (variabel) dengan konstruk (variabel) lainnya serta mengamati nilai *R-square*, *F-Square*, dan *Q-Square* berdasarkan model penelitian yang telah dirancang. Di bawah ini tersaji *inner loadings* berdasarkan model penelitian yang telah dirancang:



Sumber : Output Smart-PLS, 2020

**Gambar 4.3**  
**Nilai Loading Factor Model Struktural (Inner Model)**

Gambar 4.3 di atas menampilkan nilai *loading factor* antara konstruk (variabel) dengan konstruk (variabel) lainnya. Analisis model struktural (*inner model*) selanjutnya dilakukan dengan mengamati nilai dari koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *R-Square* dan nilai *R-Square Adjusted* berdasarkan model penelitian yang telah dirancang. Di bawah ini tersaji tabel koefisien determinasi berdasarkan model penelitian yang telah dirancang:

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi (R-Square dan R-Square Adjusted)**

	<b>R-Square</b>	<b>R-Square Adjusted</b>
AKIN	0,845	0,839
FRAUD	0,519	0,494

*Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020*

Tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai *R-Square* dan nilai *R-Square Adjusted* untuk variabel dependen yang terdapat dalam model penelitian yang telah dirancang. Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diamati bahwa nilai *R-Square Adjusted* Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIN) mempunyai nilai sebesar 0,839. Hal ini dapat diartikan bahwa 83,9% variasi dari variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIN) dijelaskan melalui variabel independen Sistem Pengadaan Barang dan / atau Jasa (*E-procurement*), Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*), dan Komitmen Organisasi sedangkan sisanya 16,1% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian yang telah dirancang. Nilai *R-Square Adjusted* Pencegahan *Fraud* (FRAUD) mempunyai nilai sebesar 0,494. Hal ini dapat diartikan bahwa 49,4% variasi dari variabel Pencegahan *Fraud* (FRAUD) dijelaskan melalui variabel-variabel independen yang terdapat dalam model penelitian, sedangkan sisanya 50,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian yang telah dirancang.

Setelah dilakukan analisis terhadap nilai *R-Square* dan *R-Square Adjusted*, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap nilai *Effect Size* (*F-Square*) untuk mengetahui kebaikan model dan *Prediction Relevance*

(Q-Square) untuk mengetahui kapabilitas/relevansi prediktif. Ghazali dan Latan (2015) menyatakan bahwa nilai *Effect Size* (F-Square) adalah 0,02 (kecil); 0,15 (menengah); dan 0,35 (kuat). Hasil pengujian *Effect Size* (F-Square) dan perhitungan *Prediction Relevance* (Q-Square) tersaji di bawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Pengujian *Effect Size* (F-Square)**

Variabel	<i>Effect Size</i>	<i>Rating</i>
<b>AKIN</b>		
SPBJ	0,000	Tidak ada
SPI	0,104	Kecil
KO	1,170	Kuat/Besar
<b>FRAUD</b>		
AKIN	0,149	Menengah
SPBJ	0,031	Kecil
SPI	0,006	Kecil
KO	0,011	Kecil

Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020

Adapun perhitungan dari *Prediction Relevance* (Q-Square) berdasarkan nilai koefisien determinasi (R-Square) tersaji di bawah ini:

$$Q^2 = 1 - \{(1-R_1^2) \times (1-R_2^2)\}$$

$$Q^2 = 1 - \{(1-0,845) \times (1-0,519)\}$$

$$Q^2 = 1 - 0,0745$$

$$Q^2 = 0,9255$$

Besaran  $Q^2$  mempunyai rentang nilai  $0 < Q^2 < 1$ . Dapat diartikan bahwa nilai  $Q^2$  semakin besar dan mendekati 1 adalah semakin baik. Berdasarkan hasil perhitungan dari *Prediction Relevance (Q-Square)* di atas dapat disimpulkan bahwa model memiliki *Prediction Relevance* yang baik.

#### **4.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

Setelah dilakukan serangkaian pengujian *outer model* dan *inner model*, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Adapun teknik untuk pengujian hipotesis adalah menggunakan metode *bootstrapping* pada *software* smart-PLS. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk analisis hasil regresi metode *bootstrapping* sebesar 5%. Pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% dapat diartikan bahwa hipotesis penelitian didukung apabila nilai P Values < tingkat signifikansi 0,05 (5%) sedangkan hipotesis penelitian tidak didukung apabila nilai P Values > tingkat signifikansi 0,05 (5%). Di bawah ini tersaji tabel hasil dari pengujian hipotesis menggunakan metode *bootstrapping*:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

	<b>Original Sample</b>	<b>T Statistics</b>	<b>P Values</b>	<b>Keterangan</b>
SPBJ->AKIN	-0,011	0,164	0,870	Tidak didukung
SPI->AKIN	0,231	3,228	0,001	Didukung
KO->AKIN	0,730	11,713	0,000	Didukung
SPBJ->FRAUD	0,169	0,862	0,389	Tidak didukung
SPI->FRAUD	0,104	0,417	0,677	Tidak didukung
KO->FRAUD	-0,181	0,737	0,461	Tidak didukung
AKIN->FRAUD	0,680	2,658	0,008	Didukung

*Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020*

Keterangan:

SPBJ: Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa

SPI: Sistem Pengendalian Internal

KO: Komitmen Organisasi

AKIN: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

FRAUD: Pencegahan *Fraud*

#### **4.5.1. Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat diamati bahwa hubungan variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan koefisien jalur sebesar -0,011 (arah negatif) dan nilai T Statistics sebesar 0,164. Nilai T Statistics < nilai T Tabel yaitu  $0,164 < 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,870. Nilai P Values > tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,870 > 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis pertama tidak didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012), Prasetyo (2013), Rahadian dan Gapur (2015), dan Heriawati (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sementara itu, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Aprizal dan Purba (2013), Pratiwi dkk. (2014), dan Nurchana, dkk. (2014) yang memaparkan bahwa penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) belum optimal sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini dimungkinkan terjadi oleh banyak faktor yang melatarbelakanginya.

Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah belum tercukupinya kebutuhan sumber daya seperti SDM dan infrastruktur IT di pengadaan barang dan/atau jasa, proses seleksi penyedia barang dan/atau jasa belum dilakukan secara optimal, para aparatur sipil yang ditugaskan belum memiliki pengetahuan menyeluruh terkait prosedur dan peraturan pada sistem pengadaan barang dan/atau jasa, terbatasnya pengetahuan tentang IT dari penyedia/pengguna sehingga belum optimal dalam memanfaatkan layanan yang tersedia pada sistem, kurangnya kompetensi SDM bidang IT untuk melakukan pengelolaan sistem, sistem atau jaringan yang mengalami kendala teknis, serta administrasi dan pelaporan aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa belum sepenuhnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Apabila kendala-kendala di atas tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan sulit mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih baik dengan penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*).

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya mengoptimalkan penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait sistem kepada seluruh pegawai terutama pegawai bidang IT yang bertugas melakukan pengelolaan sistem. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait sistem dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan pemberian pelatihan (*training*). Selain itu, instansi pemerintah hendaknya juga



melakukan sosialisasi dan pemberian pelatihan (*training*) terkait pengoperasian sistem kepada penyedia barang dan/atau jasa serta memperbaiki tampilan sistem menjadi *user-friendly* sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses seluruh layanan yang tersedia dalam sistem tersebut.

#### **4.5.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat diamati bahwa hubungan variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,231 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 3,228. Nilai T Statistics > nilai T Tabel yaitu  $3,228 > 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,001. Nilai P Values < tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis kedua didukung.

Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai/sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2014), Wulansari (2014) dan Jayatri (2015) yang menguraikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Instansi pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melakukan pemantauan/pengawasan dan evaluasi seluruh aktivitas operasional yang bertujuan untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja instansi secara berkesinambungan. Instansi pemerintah juga melakukan penilaian resiko yang meliputi identifikasi resiko (faktor internal atau eksternal) dan analisis resiko (melakukan penggolongan resiko dari tinggi ke rendah berdasarkan potensi terjadi dan dampak yang ditimbulkan) dimana hasil penilaian resiko ini nantinya akan digunakan pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan dengan baik dapat menciptakan lingkungan organisasi dengan iklim/suasana kerja yang nyaman dan kondusif dimana seluruh pegawai memiliki rasa kepedulian dan partisipasi, etos kerja, integritas, serta profesionalisme tinggi sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik SPIP diterapkan pada instansi pemerintah, maka akan semakin mudah bagi instansi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya memastikan bahwa SPIP diterapkan dengan baik salah satunya dengan memastikan bahwa kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu, instansi terkait juga harus memastikan bahwa pimpinan melakukan penilaian resiko secara mendalam dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan instansi pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### **4.5.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diamati bahwa hubungan variabel komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,730 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 11,713. Nilai T Statistics > nilai T Tabel yaitu  $11,713 > 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,000. Nilai P Values < tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis ketiga didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai/sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah (2018), Silvia (2013), dan Jayatri (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Komitmen organisasi merupakan hal penting yang harus dibangun, dijaga, dan dipertahankan oleh seluruh pegawai mulai dari atasan (*top management*) hingga bawahan.

Ketika pegawai memiliki komitmen tinggi pada organisasi, pegawai tersebut akan memiliki kepekaan dan kepedulian tinggi terhadap keberlangsungan organisasi sehingga pegawai akan berusaha memberikan kinerja yang baik dan berkomitmen untuk membawa organisasi pada kondisi yang lebih baik.

Akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dapat tercapai hanya jika seluruh pegawai memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi untuk terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi. Instansi pemerintah yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan lebih mudah mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta mencapai tujuan dan sasaran (*goals*) instansi dibandingkan dengan instansi pemerintah yang memiliki komitmen organisasi rendah atau bahkan instansi pemerintah yang tidak memiliki komitmen organisasi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya memastikan bahwa komitmen organisasi terbentuk dengan baik (komitmen organisasi tinggi) dimana seluruh pegawai memiliki persepsi/cara pandang yang sejalan dengan instansi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan instansi mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta mencapai tujuan dan sasaran (*goals*) instansi.

#### **4.5.4. Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis keempat dapat diamati bahwa hubungan variabel sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,169 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 0,862. Nilai T Statistics < nilai T Tabel yaitu  $0,862 < 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,389. Nilai P Values > tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,389 > 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis keempat tidak didukung. Hal ini

dapat diartikan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012), Artantri dkk. (2016), Danuta (2016), Danuta (2017), Akbar dkk. (2019), Lintangari dkk. (2017), dan Nugroho dkk. (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan/atau jasa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Romaissah, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dan penelitian Faisol, dkk. (2014) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya *fraud* dikarenakan terdapat tahap-tahap pengadaan barang dan/atau jasa yang tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) diduga belum optimal sehingga belum mampu menekan/mencegah peluang terjadinya *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal diantaranya adalah persaingan yang terjadi di antara penyedia barang dan/atau jasa belum sepenuhnya sehat meskipun telah diterapkan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) sehingga hal ini dapat membuka celah terjadinya *fraud*, informasi yang ditampilkan pada sistem

pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) kurang informatif atau bahkan multi tafsir sehingga mengharuskan penyedia barang dan/atau jasa yang mengikuti *tender* untuk menghubungi pihak berwenang (panitia *tender* atau ULP/BLP/BPBJ/LPSE terkait) dimana kegiatan bertukar informasi ini rentan sekali memicu terjadinya *fraud*.

Selain itu, terbatasnya pengetahuan tentang IT dalam pengoperasian sistem atau adanya kendala teknis seperti jaringan/*server error* mendorong penyedia/pengguna datang langsung ke ULP/BLP/BPBJ/LPSE untuk meminta bantuan dalam prosesnya dimana hal tersebut dapat memberikan peluang “orang dalam” melakukan intervensi dan membuka celah terjadinya *fraud*. Keterbatasan pengetahuan dan *awareness* para aparatur sipil pengadaan barang dan/atau jasa terkait *fraud* dikarenakan kurangnya edukasi dari pimpinan turut serta membuka peluang terjadinya *fraud*.

Apabila kendala-kendala di atas tidak dapat teratasi dengan baik, maka penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) tidak akan optimal dan sulit membantu upaya pemerintah dalam pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya mengoptimalkan penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa sehingga dapat membantu upaya pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan (*training*) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pegawai terkait *fraud*,

menerapkan kebijakan anti *fraud*, dan menerapkan prosedur yang ketat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.

#### **4.5.5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis kelima dapat diamati bahwa hubungan variabel sistem pengendalian internal (*internal control system*) terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,104 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 0,417. Nilai T Statistics < nilai T Tabel yaitu  $0,417 < 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,677. Nilai P Values > tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,677 > 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis kelima tidak didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal (*internal control system*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2013), Akbar dkk. (2019), Lintang Sari dkk. (2017), Soleman (2013), Dewi dkk. (2017b), dan Natasya dkk. (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nurlina dkk. (2018) yang menyatakan variabel pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan pada deteksi kecurangan (*fraud*), Asrifah (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan penelitian Adi dkk. (2016)

yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Instansi pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan sistem terintegrasi dimana seluruh pegawai pada instansi pemerintah terkait wajib untuk mentaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan kepada masing-masing pegawai. Dengan kata lain, pegawai yang menjadi sampel penelitian ini seharusnya sudah mentaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang telah dimandatkan kepada masing-masing pegawai.

Tidak berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dimungkinkan karena belum optimalnya penerapan SPIP pada instansi terkait diantaranya adalah kegiatan *monitoring* dan evaluasi seluruh aktivitas operasional pengadaan barang/dan atau jasa untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik belum dilaksanakan secara optimal, lingkungan pengendalian belum terbentuk dengan baik, dan penilaian resiko (identifikasi dan analisis resiko) oleh pimpinan belum dilakukan secara optimal sehingga dapat memberikan celah/membuka peluang bagi oknum pegawai untuk melakukan *fraud*.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian



Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan penilaian resiko secara mendalam pada setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya *fraud*.

#### **4.5.6. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis keenam dapat diamati bahwa hubungan variabel komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan koefisien jalur sebesar -0,181 (arah negatif) dan nilai T Statistics sebesar 0,737. Nilai T Statistics < nilai T Tabel yaitu  $0,737 < 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,461. Nilai P Values > tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,461 > 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis keenam tidak didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai/tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2013) dan Natasya dkk. (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/atau jasa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Chandra dan Ikhsan (2015) Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud*.

Tidak berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dimungkinkan karena pegawai merasa bahwa bekerja pada instansi

tersebut memberikan berbagai keuntungan bagi dirinya, maka pegawai tersebut berkomitmen dan loyal pada instansi pemerintah. Sebaliknya, ketika pegawai tersebut merasa instansinya kurang memberikan keuntungan bagi dirinya, maka komitmen dan loyalitas tersebut akan luntur. Dengan kata lain, komitmen organisasi belum sepenuhnya terbentuk dan masih sebatas formalitas saja.

Dorongan (*pressure*) terkuat dan melandasi seorang pegawai untuk melakukan *fraud* biasanya timbul dari dalam diri seseorang (faktor internal) diantaranya yaitu keserakahan, tekanan memenuhi kebutuhan, gaya hidup mewah dan konsumtif, terlibat perjudian/miras/narkoba, dan lain sebagainya. Selain itu adanya kesempatan juga dapat memberikan celah bagi seorang pegawai untuk melakukan *fraud*. Sehingga komitmen organisasi tidak sepenuhnya dapat memberikan jaminan bahwa pegawai tidak akan melakukan *fraud*, terlebih ketika pegawai sedang mengalami tekanan (*pressure*) dan memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya memastikan bahwa komitmen organisasi terbentuk dengan baik (bukan sebatas formalitas) agar dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya *fraud*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan *reward and punishment* dimana kebijakan tersebut dapat meningkatkan loyalitas pegawai terhadap instansi terkait, menerapkan kebijakan pegawai mengambil peran/berpartisipasi untuk memberikan saran dan/atau masukan dalam proses pengambilan keputusan

dimana hal ini dapat menumbuhkan rasa memiliki dan keterikatan pegawai terhadap instansi terkait serta dengan membuat pakta integritas yang berisikan komitmen pegawai untuk melaksanakan seluruh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan dengan baik serta pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran (*goals*) instansi terkait.

#### **4.5.7. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud***

Hasil pengujian hipotesis ketujuh dapat diamati bahwa hubungan variabel akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,680 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 2,658. Nilai T Statistics > nilai T Tabel yaitu 2,658 > 1,96. Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,008. Nilai P Values < tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu 0,008 < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka hipotesis ketujuh didukung. Hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai/sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Pambelum (2008) dan Nurlina dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap deteksi kecurangan (*fraud*) sejak awal/sejak dini sebagai upaya pencegahan *fraud*. Instansi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik mampu merencanakan program

kerja, melaksanakan program kerja, dan melakukan *monitoring* evaluasi terhadap ketercapaian program kerja/kinerja serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasional yang dijalankan kepada instansi yang menaungi di atasnya.

Instansi dengan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik memberikan jaminan/dapat dipastikan bahwa instansi tersebut melakukan kegiatan operasinya secara efisien, efektif dan responsif pada kehendak/keinginan masyarakat. Lingkungan kerja yang kondusif dengan potensi terjadi *fraud* rendah dapat terwujud ketika instansi tersebut telah mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik mampu membantu instansi pemerintah menutup celah/menekan peluang seseorang untuk melakukan *fraud*.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya memastikan bahwa instansi telah memiliki akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik sehingga mampu untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan peluang terjadinya *fraud* rendah.

#### **4.5.8. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

Pengujian pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dilakukan dimaksudkan untuk mengamati pengaruh tidak langsung dari variabel komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dengan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel *intervening*. Di bawah ini tersaji hasil pengujian menggunakan PLS:

**Tabel 4.12**  
**Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)**

Variabel	Original Sample	T Statistics	P Values	Keterangan
KO -> AKIN -> FRAUD	0,496	2,630	0,009	Didukung

*Sumber : Data diolah berdasarkan output Smart-PLS, 2020*

Keterangan:

KO: Komitmen Organisasi

AKIN: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

FRAUD: Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat diamati bahwa variabel komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dengan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel *intervening* menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,496 (arah positif) dan nilai T Statistics sebesar 2,630. Nilai T Statistics > nilai T Tabel yaitu  $2,630 > 1,96$ . Selain itu, nilai P Values menunjukkan nilai 0,009. Nilai P Values < tingkat signifikansi 0,05 (5%) yaitu  $0,009 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa variabel komitmen organisasi memberikan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel *intervening*. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah (variabel *intervening*) berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan suatu wujud nyata pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan operasional instansi bahwa

kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan responsif pada kehendak/keinginan masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran (*goals*) instansi. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik secara tidak langsung membentuk lingkungan kerja yang kondusif dengan potensi terjadinya *fraud* rendah dikarenakan keteraturan tata kelola pemerintahan mampu memperkecil ruang gerak/menutup peluang pelaku untuk melakukan *fraud*.

Widiutami dkk. (2017) menjelaskan untuk meminimalkan *fraud* perlu adanya peningkatan efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan komitmen organisasi. Komitmen organisasi sendiri dapat terbentuk apabila masing-masing pegawai memahami posisi terkait hak dan kewajibannya dalam instansi tersebut. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, komitmen organisasi dibutuhkan sebagai salah satu pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat menekan potensi/mencegah terjadinya *fraud*.

Komitmen organisasi yang tidak terbentuk dengan baik dapat menimbulkan perbedaan persepsi (cara pandang) pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran (*goals*) instansi. Hal tersebut akan menyulitkan instansi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik untuk menekan potensi/mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi instansi pemerintah terkait hendaknya memastikan bahwa komitmen organisasi terbentuk dengan baik (bukan sebatas formalitas) guna mewujudkan akuntabilitas

kinerja pemerintah yang baik sehingga dapat membantu upaya pemerintah dalam meminimalkan peluang/mencegah terjadinya *fraud*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) belum optimal. Kurang optimalnya penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dapat dilandasi oleh banyak faktor yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) belum sepenuhnya mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Sistem pengendalian internal (*internal control system*) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Instansi pemerintah dalam melakukan aktivitas pengendalian internal menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Semakin baik SPIP diterapkan pada instansi, maka akan semakin mudah bagi instansi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



3. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat tercapai jika seluruh pegawai berkomitmen tinggi untuk terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi. Instansi pemerintah yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan lebih mudah mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta mencapai tujuan dan sasaran (*goals*) instansi.
4. Sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) belum optimal. Penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) yang belum optimal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) belum mampu menekan/mencegah peluang terjadinya *fraud*.
5. Sistem pengendalian internal (*internal control system*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena belum optimalnya penerapan SPIP pada instansi terkait diantaranya adalah kegiatan *monitoring*, evaluasi, dan penilaian resiko oleh pimpinan belum dilaksanakan secara optimal serta lingkungan pengendalian yang belum terbentuk dengan baik sehingga

dapat memberikan celah/membuka peluang bagi oknum pegawai untuk melakukan *fraud*.

6. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena komitmen organisasi belum sepenuhnya terbentuk dan masih sebatas formalitas saja. Komitmen organisasi tidak sepenuhnya dapat memberikan jaminan bahwa pegawai tidak akan melakukan *fraud*, dorongan (*pressure*) dan adanya kesempatan adalah faktor-faktor yang dapat memberikan celah/membuka peluang oknum pegawai melakukan *fraud*.
7. Akuntabilitas kinerja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lingkungan kerja yang kondusif dengan potensi terjadinya *fraud* rendah dapat terwujud ketika instansi tersebut telah mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik mampu membantu instansi pemerintah menutup celah/menekan peluang seseorang untuk melakukan *fraud*.
8. Komitmen organisasi memberikan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel *intervening*. Komitmen organisasi dibutuhkan instansi pemerintah sebagai salah satu pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah demi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga dapat menekan potensi/mencegah terjadinya *fraud*.

## 5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka kontribusi dan implikasi penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Implikasi Teoritis (Kontribusi Penelitian)

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut atau melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman/literatur/acuan pustaka/referensi yang dapat mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan.

### b. Implikasi Praktis (Bagi Pemerintah)

Bagi instansi pemerintah yang menjadi objek dalam penelitian ini hendaknya mengoptimalkan penerapan sistem pengadaan barang dan/atau jasa (*e-procurement*) dengan cara berusaha meminimalkan kemungkinan/potensi terjadinya kendala-kendala yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Instansi pemerintah hendaknya mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal (*internal control system*) dengan cara melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan penilaian resiko yang lebih baik sebelum dilakukan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Instansi pemerintah juga hendaknya memastikan bahwa komitmen organisasi telah terbentuk dengan baik dari pimpinan hingga bawahannya. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk membantu instansi

pemerintah mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang lebih baik yang tentunya dapat menekan potensi/mencegah terjadinya *fraud*.

### **5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

#### **1. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya memiliki cakupan geografis yang terbatas dikarenakan objek penelitian hanya terbatas pada Kantor ULP/BLP/BPBJ dan LPSE di kabupaten/kota serta provinsi D.I. Yogyakarta saja sehingga kemungkinan kurang mampu untuk memberikan gambaran keseluruhan atau kurang mampu digeneralisasikan seperti apabila penelitian dilakukan secara nasional (seluruh Indonesia).
- b. Rentang waktu pengumpulan data penelitian relatif lama dikarenakan adanya beberapa tahapan/prosedur yang harus dilalui dalam perizinan pengambilan data penelitian dan kepadatan aktivitas/pekerjaan responden penelitian dikarenakan banyaknya lelang/*tender* yang sedang ditangani di instansi terkait sehingga peneliti terkendala dalam mendapatkan data penelitian dan menyelesaikan tugas akhir sesuai waktu yang direncanakan.

#### **2. Saran Penelitian**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian akan datang hendaknya memperluas cakupan geografis yang digunakan dengan tetap mempertahankan Kantor

ULP/BLP/BPBJ dan LPSE sebagai objek penelitian sehingga hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan mampu untuk memberikan gambaran keseluruhan atau mampu digeneralisasikan.

- b. Penelitian akan datang hendaknya menyediakan cukup waktu untuk mengurus seluruh tahapan/prosedur dalam perizinan pengambilan data penelitian dan menghimpun lebih banyak informasi terkait waktu yang tepat dalam pengambilan data penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan.
- c. Penelitian akan datang hendaknya menggunakan atau menambahkan variabel-variabel potensial lain seperti variabel ketaatan pada peraturan perundangan, kompetensi aparatur pemerintah, *good governance*, *whistle blowing system*, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Moh. R.K, K Ardiyani, and A Ardianingsih. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan)." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 10: 1–10.
- Admin. 2011. "LPSE Provinsi DIY Menerima Penghargaan Dari LKPP RI Sebagai LPSE Motivator Pada Rakornas LPSE Ke 6." 2011. <https://www.lpse.jogjaprov.go.id/eproc/publicberitadetail/459013>.
- Admin. 2018. "LPSE Kulon Progo Sabet Penghargaan Nasional E-Procurement Award2018."2018.[https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view\\_berita/5101/LPSE-Kulon-Progo-Sabet-Penghargaan-Nasional-e-Procurement-Award-2018](https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/5101/LPSE-Kulon-Progo-Sabet-Penghargaan-Nasional-e-Procurement-Award-2018).
- Akbar, A.G., Rosidi, and W. Andayani. 2019. "Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi," 69–81.
- Albrecht, W., C. Albrecht, C. Albrecht, and M. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. Edited by Jack W. Calhoun, Rob Dewey, and Matt Filimonov. Fourth Edi. Cengage Learning. [www.cengage.com](http://www.cengage.com).
- Amrullah, K. 2018. "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten Muara Enim)." Universitas Lampung.
- Aprizal, and J.R.T. Purba. 2013. "Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Pangkalpinang." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 17 (1): 15–28. <https://doi.org/10.22146/jkap.6846>.
- Arifa, E. 2015. "LPSE Kota Yogyakarta Terima Penghargaan National ProcurementAward."2015. <https://jogja.antaranews.com/berita/335758/lpse-yogyakarta-terima-penghargaan-national-procurement-award>.
- Arifin, A. 2014. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Massenrempulu, Kabupaten Enrekang)." Universitas Hasanuddin Makassar.
- Artantri, L., L. Handajani, and E. Pituringsih. 2016. "Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Daerah Di Pulau Lombok.” *NeO~Bis* 10 (1): 16–32.

Asrifah, U. 2018. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus).” Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Chandra, D.P., and S Ikhsan. 2015. “Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan.” *Accounting Analysis Journal* 4 (3): 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8308>.

Danuta, K. 2016. “Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mencegah Fraud Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada.

Danuta, K. 2017. “Crowe’s Fraud Pentagon Theory Dalam Pencegahan Fraud Pada Proses Pengadaan Melalui E-Procurement.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 1 (2): 161–71. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>.

Dewi, K.F., A. Putra, and I. Astika. 2017. “Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 22 (1): 21–33.

Dewi, K.A.K., E. Sujana, and G. Yuniarta. 2017. “Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Moralitas Individu, Gaya Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Kas (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Buleleng).” *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha* 7 (1).

Faisol, I.A., Tarjo, and S Musyarofah. 2014. “Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik.” *JAFFA* 02 (2): 71–90.

Ghozali, I., and H. Latan. 2015. *Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hasanuddin, M. 2013. “70 Persen Korupsi Dari Barang Dan Jasa.” 2013. <https://www.antaraneews.com/berita/378389/70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa>.

Heriawati, L. 2018. “Pengaruh Penerapan Electronic Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian

Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.”  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta.

Humas. 2020. “Terbaik Se-Indonesia, SAKIP DIY Kembali Raih Predikat AA.”  
2020.<https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/8531-pemda-diy-kembali-raih-predikat-aa>.

Ihsanuddin. 2019. “LKPP: Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Peringkat 2 Di  
KPK.” 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk>.

Iqbal, M., and Murtanto. 2016. “Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Seminar Nasional Cendekiawan 2016*, no. 2002: 1–20.

Jayatri, A. 2015. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Suraba.” Universitas Airlangga Surabaya.

Julia, D. 2012. “Analisis Kinerja Rumah Sakit Swasta Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Kasih Ibu Di Surakarta).”  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Lintangsari, M., D. Hapsari, and E. Budiono. 2017. “Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Dan Banten)” 4 (3): 2661.

Najahningrum, A. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY.” Universitas Negeri Semarang.

Natasya, T., H. Karamoy, and R. Lambey. 2017. “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Sulut” 12 (2): 847–56.

Nugraha, A. 2018. “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kultur Organisasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Tindakan Accounting Fraud.” Universitas Islam Indonesia.

Nugroho, R., A. Wanto, and Trisnawati. 2015. “Pengaruh Implementasi Sistem



Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan).” *Jurnal Administrasi Publik* 3 (11): 1905–11.

Nurchana, A., B. Haryono, and R. Adiono. 2014. “Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2 (2): 355–59.

Nurharjanti, N. 2017. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Publik.” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 18 (2): 209–21. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>.

Nurlina, D., S. Falah, and M. Asnawi. 2018. “The Effect of Procurement System and Internal Control System On Accountability of Instant Performance in Preventing Fraud” 9 (4): 29–39.

Pongsapan, H. 2017. “Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Pendekteksian Dan Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT. Aneka Tambang, Tbk.)”

Prasetyo, H. 2013. “Implementasi Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Procurement Sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Di Pemerintah Kota Surabaya.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 1 (1).

Pratiwi, Q., C. Saleh, and A. Wahid. 2014. “Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Procurement ( Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri ).” *Jap* 2 (2): 344–49.

Purwanti, S. 2016. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Penegakan Hukum Peraturan, Komitmen Organisasi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud).” Universitas Muria Kudus.

Purwanto, S. 2008. “Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement.” *Jurnal Teknik Sipil* 9 (1): 43–56. [http://internal-pdf//Kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi e-procurement-0759337217/Kajian prosedur pengadaan jasa konstruksi e-procurement.pdf](http://internal-pdf//Kajian%20prosedur%20pengadaan%20jasa%20konstruksi%20e-procurement-0759337217/Kajian%20prosedur%20pengadaan%20jasa%20konstruksi%20e-procurement.pdf).

Purwitasari, A. 2013. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey Pada 5 Rumah Sakit Di Bandung).” [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(79\)91018-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(79)91018-3).

Rahadian, A., and I. Gapur. 2015. “Pengaruh Sistem E-Procurement Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa

Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Manajemen*.

Rimata, E. 2014. “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. POS INDONESIA Yogyakarta.” Universitas Negeri Yogyakarta.

Romaissah, S Imtikhanah, and R Hidayah. 2019. “Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Neraca FEB* 15 (2): 65–80.

Salim, M., Syarifuddin, and Syamsuddin. 2016. “Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E- Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang DanJasa Pemerintah.” *Jurnal Analisis* 5 (2): 178–85.

Santoso, U., and Y. Pabelum. 2008. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4 (1): 14–33.

Sari, D. 2012. “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis*,718–27.  
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1914>.

Sekaran, U., and R. Bougie. 2016. *Research Methods for Business*. Seventh Ed. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Silvia. 2013. “Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Payakumbuh).” Universitas Negeri Padang.  
<https://doi.org/10.11113/jt.v56.60>.

Soleman, R. 2013. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 17 (1): 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>.

Sucahyo, Y., and Y. Ruldeviyani. 2009. *Implementasi E-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: LKPP.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sutedi, A. 2012a. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. 2012b. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tehupuring, R., and R. Lingga. 2017. "Sistem Pengendalian Intern Sebagai Prediktor Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah. Dapatkah Loyalitas Individu Memitigasinya?" *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Udoyono, K. 2012. "E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3 (1): 135–71.
- Widiutami, N., N. Sulindawati, and A. Atmadja. 2017. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng)" 7 (1).
- Wulansari, P. 2014. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung)." Universitas Widyatama Bandung.
- Zelmiyanti, R. 2016. "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)." *Jrak* 7 (1): 11–21.

# LAMPIRAN 1



**KUESIONER PENELITIAN**

## KUESIONER PENELITIAN

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Sehubungan untuk memenuhi tugas akhir (tesis) sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saya bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Sistem Pengadaan, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan *Fraud*”**.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi kuisisioner ini secara jujur dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seluruh data yang diperoleh melalui kuisisioner ini akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian kuisisioner ini kami sampaikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Marsita Wuri Andari, S.E.

## PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda centang (✓) / *check list* pada salah satu kolom pilihan jawaban yang telah tersedia sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

**Saudara diharapkan hanya memilih jawaban NETRAL jika Saudara tidak mengetahui sama sekali pernyataan yang diajukan, atau Saudara belum pernah mengalami / melakukan aktivitas / situasi / kondisi pada pernyataan tersebut.**

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (boleh tidak diisi)  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Pendidikan Terakhir :

### Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*E-procurement*)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan dana, daya upaya, dan fasilitas yang seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.					
2.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin sesuai dengan sasaran yang					

	ditetapkan.					
3.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.					
4.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa.					
5.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa sudah memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.					
6.	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa bersifat terbuka.					
7.	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa.					
8.	Administrasi pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel.					

(Heriawati, 2018) dengan penyesuaian

### Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Di tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.					
2.	Atasan saya memberikan arahan yang jelas terkait pekerjaan yang harus saya lakukan.					
3.	Saya melakukan pekerjaan					

	sesuai dengan SOP yang berlaku.					
4.	Di tempat saya bekerja tidak mengizinkan saya untuk melakukan manipulasi data meski hal itu demi kebaikan organisasi.					
5.	Tempat saya bekerja mendorong saya untuk bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.					
6.	Manajemen rutin dalam memantau serta mengevaluasi aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal.					
7.	Manajemen memberi pemahaman kepada saya tentang resiko bisnis dan mengharuskan saya untuk mengukur resiko tersebut sebelum bertindak.					
8.	Saya diberikan fasilitas berupa kegiatan <i>training</i> untuk meningkatkan produktivitas saya dalam bekerja.					

(Nugraha, 2018) dan (Najahningrum, 2013) dengan penyesuaian

### Komitmen Organisasi

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari instansi ini.					
2.	Saya merasa bangga saat memperkenalkan kepada orang lain bahwa instansi tempat saya bekerja adalah instansi yang bagus.					
3.	Saya memilih untuk bergabung					



	dengan instansi ini sebagai tempat saya bekerja daripada instansi lain.					
4.	Saya bersedia menerima segala bentuk penugasan agar tetap bisa bekerja dengan instansi ini.					
5.	Instansi ini memberikan inspirasi yang bagus bagi saya untuk berprestasi.					
6.	Saya merasa ikut memiliki dan sangat peduli dengan nasib instansi ini.					
7.	Saya bersedia untuk bekerja lembur agar instansi ini dapat berkembang lebih baik.					
8.	Prinsip, nilai, tujuan, dan kinerja saya sejalan dengan prinsip, nilai, tujuan, dan kinerja instansi ini.					
9.	Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain menurut pandangan saya adalah tidak etis.					
10.	Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan yang lebih baik di organisasi lain, saya tidak akan merasa bahwa tawaran tersebut merupakan alasan yang tepat bagi saya untuk meninggalkan organisasi tempat saya sekarang bekerja.					

(Najahningrum, 2013) dan (Rimata, 2014) dengan penyesuaian

### **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Pegawai mengetahui kondisi geografis dan demografis instansi tempat mereka					

	bekerja.					
2.	Pegawai mengetahui dan memahami visi dan misi instansi tempat mereka bekerja.					
3.	Pegawai bekerja lebih maksimal dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan.					
4.	Sumber daya yang ada pada instansi sudah memadai.					
5.	Pimpinan dalam proses pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.					
6.	Proses pengelolaan program dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana program.					
7.	Pegawai dapat mengevaluasi diri terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.					
8.	Pegawai mempunyai jenjang karier yang baik dalam rangka meningkatkan pangkat/golongan.					
9.	Kenaikan pangkat/golongan diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk naik pangkat.					
10.	Pegawai mempunyai peluang berkembang untuk meningkatkan kinerja lembaga.					
11.	Seluruh aktivitas operasional instansi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.					

(Heriawati, 2018) dengan penyesuaian

### Pencegahan *Fraud*

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Pimpinan tempat saya bekerja sudah menetapkan kebijakan anti <i>fraud</i> di instansi.					
2.	Pegawai di instansi tempat saya bekerja sudah melaksanakan kebijakan anti <i>fraud</i> .					
3.	Instansi tempat saya bekerja sudah menetapkan prosedur penanganan pencegahan <i>fraud</i> secara tertulis dan baku.					
4.	Pimpinan sudah memproses dan menindak pelaku <i>fraud</i> pada instansi tempat saya bekerja.					
5.	Instansi tempat saya bekerja sudah menetapkan pengendalian internal yang memadai untuk pencapaian tujuan organisasi.					
6.	Evaluasi seluruh aktivitas operasional instansi tempat saya bekerja dilakukan secara berkesinambungan.					
7.	Pimpinan sudah melaksanakan pembagian tugas yang jelas sehingga tak satupun pegawai di instansi tempat saya bekerja merangkap tugas dan tanggung jawab atau menguasai seluruh aktivitas operasional instansi.					
8.	Pengawasan ( <i>monitoring</i> ) yang ketat telah dilakukan terhadap semua aspek yang memungkinkan untuk terjadinya <i>fraud</i> .					
9.	Dilakukan kontrol yang memadai terhadap media					

	pendukung operasional					
10.	Instansi tempat saya bekerja sudah menerapkan prosedur yang memadai untuk melaporkan <i>fraud</i> .					

(Pongsapan, 2017) dengan penyesuaian



# LAMPIRAN 2

**REKAPITULASI KUESIONER PENELITIAN**



a. Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*E-procurement*)

NO	SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA							
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
1	4	4	4	4	5	4	4	4
2	4	5	5	5	5	5	5	5
3	2	5	5	5	5	5	5	5
4	2	5	5	5	5	4	5	5
5	2	4	5	4	4	5	4	4
6	4	5	5	5	5	3	5	5
7	4	4	2	4	4	2	4	4
8	2	4	4	4	4	4	4	4
9	2	4	4	4	4	4	4	4
10	2	4	4	4	4	4	4	4
11	1	4	4	5	4	4	4	4
12	2	4	5	4	4	4	5	5
13	5	5	5	5	5	4	4	4
14	4	5	5	5	5	5	4	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5
19	4	5	4	3	5	4	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	5	5	5	5	5	5	4
23	4	4	4	5	4	5	4	5
24	2	3	4	5	5	5	5	5
25	2	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	2	4	4	4	4	4
27	4	4	5	5	4	5	5	5
28	4	5	5	5	5	5	5	5
29	4	4	4	5	5	4	5	5
30	2	4	2	5	5	5	4	5
31	2	5	5	5	5	4	4	2
32	2	4	4	4	4	1	4	4
33	4	4	4	5	4	3	4	4
34	4	4	4	4	5	5	5	5
35	4	4	4	4	4	4	4	4

36	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	5	5	5	3	3	4
40	4	5	5	5	5	5	5	5
41	3	4	4	5	5	5	5	5
42	2	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	3	2	4	3
44	2	5	4	5	5	2	5	5
45	2	4	4	4	4	4	4	4
46	2	4	4	5	4	3	5	5
47	3	5	4	5	4	5	5	5
48	5	5	5	5	5	5	5	5
49	5	4	5	5	4	4	4	4
50	5	4	4	4	4	5	4	5
51	4	5	4	5	4	5	4	5
52	3	4	4	4	4	4	4	4
53	4	5	5	5	5	5	5	5
54	4	5	5	5	5	5	5	5
55	2	4	4	4	4	5	4	4
56	2	5	5	5	5	5	5	5
57	2	4	2	5	5	5	4	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5
59	4	4	4	5	4	4	4	4
60	3	5	5	5	5	4	5	5
61	2	5	5	5	4	5	5	4
62	2	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	5	5	4	4
64	4	4	5	5	5	5	5	5
65	5	5	5	5	5	5	5	5
66	3	4	4	4	4	5	5	5
67	2	4	4	4	4	4	4	4
68	1	5	5	5	5	5	5	5
69	4	4	4	5	4	5	5	5
70	5	5	5	5	5	5	5	5
71	4	5	5	5	5	5	5	5
72	4	5	5	5	4	4	4	5
73	5	5	5	4	4	4	5	5
74	5	4	5	5	4	4	4	5

75	4	4	5	5	4	4	4	5
76	2	4	4	4	4	4	4	4
77	4	5	5	5	5	5	5	5
78	4	5	5	5	5	5	5	5
79	4	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5	5	5	5
81	4	5	5	5	5	5	5	5
82	4	5	5	5	5	5	5	5
83	5	5	5	5	5	5	5	5
84	4	4	5	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5	5

**b. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)**

NO	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
1	4	4	4	5	4	4	3	4
2	4	4	4	5	4	4	5	4
3	4	4	5	5	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4	4	3
5	4	4	4	5	4	4	4	4
6	4	5	4	5	5	4	4	5
7	4	4	4	4	4	4	3	4
8	4	4	5	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3
11	4	4	4	5	4	4	4	4
12	5	5	5	4	4	5	4	4
13	4	4	4	5	4	4	4	4
14	4	4	5	4	4	4	4	3
15	4	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	4	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5
19	4	4	4	5	4	4	5	4
20	3	3	3	4	3	3	3	4
21	4	4	4	5	5	5	4	5
22	5	5	5	5	5	4	4	4
23	4	4	4	5	4	4	4	4



24	4	5	4	2	4	4	4	3
25	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	5
28	5	5	5	5	5	5	5	5
29	4	4	5	5	4	4	4	4
30	4	3	4	5	4	3	3	4
31	4	4	4	5	4	4	2	5
32	4	4	4	4	5	4	5	4
33	4	4	4	5	4	4	4	4
34	4	4	4	5	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	4	4	4	4	3
40	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	5	5	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4
43	3	3	3	3	3	3	3	4
44	4	5	4	5	5	5	5	5
45	4	4	4	4	4	3	3	3
46	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	5	4
48	4	4	4	5	5	4	4	4
49	4	4	5	4	4	5	4	4
50	4	4	5	4	4	4	4	3
51	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4
53	5	4	5	5	5	5	5	4
54	5	5	5	5	5	5	5	5
55	5	3	4	5	4	4	4	3
56	4	4	4	5	5	5	4	3
57	4	3	4	5	4	3	3	4
58	4	4	5	5	5	4	4	4
59	4	4	4	5	5	4	4	4
60	5	5	5	5	5	5	5	4
61	4	4	4	5	4	4	4	5
62	4	3	4	4	4	4	3	4

63	4	4	4	4	4	4	4	4
64	5	4	5	5	5	4	4	3
65	5	5	5	5	5	5	5	3
66	4	4	4	4	5	4	4	4
67	3	4	4	4	4	4	4	4
68	5	1	5	5	1	1	1	1
69	4	4	4	5	5	3	3	4
70	4	4	4	5	5	5	5	5
71	5	5	5	5	5	5	5	5
72	5	4	5	4	4	4	5	4
73	4	4	5	5	4	4	4	3
74	4	4	4	5	4	4	4	4
75	4	4	4	5	5	4	4	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4
77	5	5	5	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	5	5	5
82	5	5	5	5	5	5	5	5
83	4	4	4	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	5	5	5	5	5

c. **Komitmen Organisasi**

NO	KOMITMEN ORGANISASI									
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
1	4	4	5	2	4	4	4	4	2	5
2	5	4	3	4	5	5	5	5	3	5
3	5	5	4	4	5	5	5	5	4	3
4	5	5	5	4	5	5	3	4	1	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
6	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
9	4	4	2	2	4	4	2	4	2	4
10	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3
11	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4

12	5	5	5	4	4	4	4	4	2	3
13	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
15	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
16	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
19	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3
20	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2
21	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	2	4	4	4	2	4	2	4
24	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3
25	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2
26	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4
27	5	5	3	4	5	4	4	4	3	3
28	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
30	4	2	4	2	4	4	4	3	2	5
31	5	5	4	2	4	4	5	5	1	2
32	4	4	3	2	4	4	4	4	2	4
33	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	3	3	4	4	4	3	2	2
40	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
41	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4
42	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4
43	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3
44	5	5	5	4	5	5	4	5	3	4
45	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
46	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
47	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2
48	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
49	4	4	5	4	4	3	4	4	3	3
50	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3

51	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3
52	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4
53	5	3	3	4	5	3	2	5	3	3
54	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3
55	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3
56	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3
57	4	2	4	2	4	4	4	3	2	5
58	5	4	5	3	4	5	4	4	3	4
59	4	4	3	1	3	4	3	4	2	1
60	5	5	3	5	5	5	4	5	3	3
61	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4
62	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3
63	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3
64	3	4	4	4	5	5	4	5	3	3
65	5	3	3	5	4	5	5	5	3	3
66	4	3	3	3	4	4	3	3	1	3
67	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
72	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3
73	4	4	4	3	4	5	3	4	3	3
74	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
75	4	4	3	2	4	4	4	4	3	3
76	5	4	2	2	4	4	2	3	2	2
77	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
78	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
79	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5
80	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
82	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**d. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

NO	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH										
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11
1	5	4	4	2	5	4	4	4	5	4	4
2	5	5	5	3	4	5	5	4	5	4	5
3	4	4	5	3	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	2	5	4	4	2	4	4	5
5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4
10	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
13	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5
14	3	4	4	2	4	4	3	3	4	3	4
15	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
16	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
17	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
19	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3
20	4	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
22	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4
23	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4
25	4	4	3	2	3	3	4	3	4	3	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4
32	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4
34	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4
40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	2	3	4	4	3	3	4	3
44	4	4	5	2	5	5	5	5	5	5	5
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5
49	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
57	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4
59	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4
60	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5
61	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
64	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
66	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4
67	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
68	5	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1
69	4	4	4	2	4	4	4	4	5	4	4
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
72	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5
73	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

75	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
77	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
79	5	5	5	4	5	5	4	3	5	4	5
80	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
82	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
84	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**e. Pencegahan Fraud**

NO	PENCEGAHAN FRAUD									
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	X5.9	X5.10
1	5	4	3	3	4	4	2	4	4	3
2	5	4	3	3	5	5	3	5	5	3
3	5	5	4	3	5	5	4	5	5	5
4	5	5	2	4	5	5	3	5	4	4
5	3	4	2	3	3	4	2	3	4	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3	3	4	4	2	4	3	3
8	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
9	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
10	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
11	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
12	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4
13	5	5	3	3	4	4	4	4	4	3
14	5	5	4	3	4	3	2	3	3	3
15	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
16	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
18	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
19	4	4	4	5	4	4	3	4	3	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
23	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4

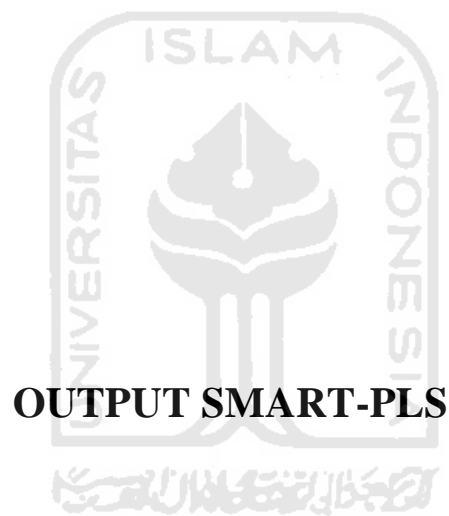
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3
31	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
32	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
33	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3
43	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	5	5	5	3	4	4	3	4	4	3
49	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4
56	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
57	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3
58	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
59	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4
60	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
61	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3



63	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
67	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3
68	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5
69	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4
70	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3
71	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
72	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
73	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
82	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

الجامعة الإسلامية

# LAMPIRAN 3

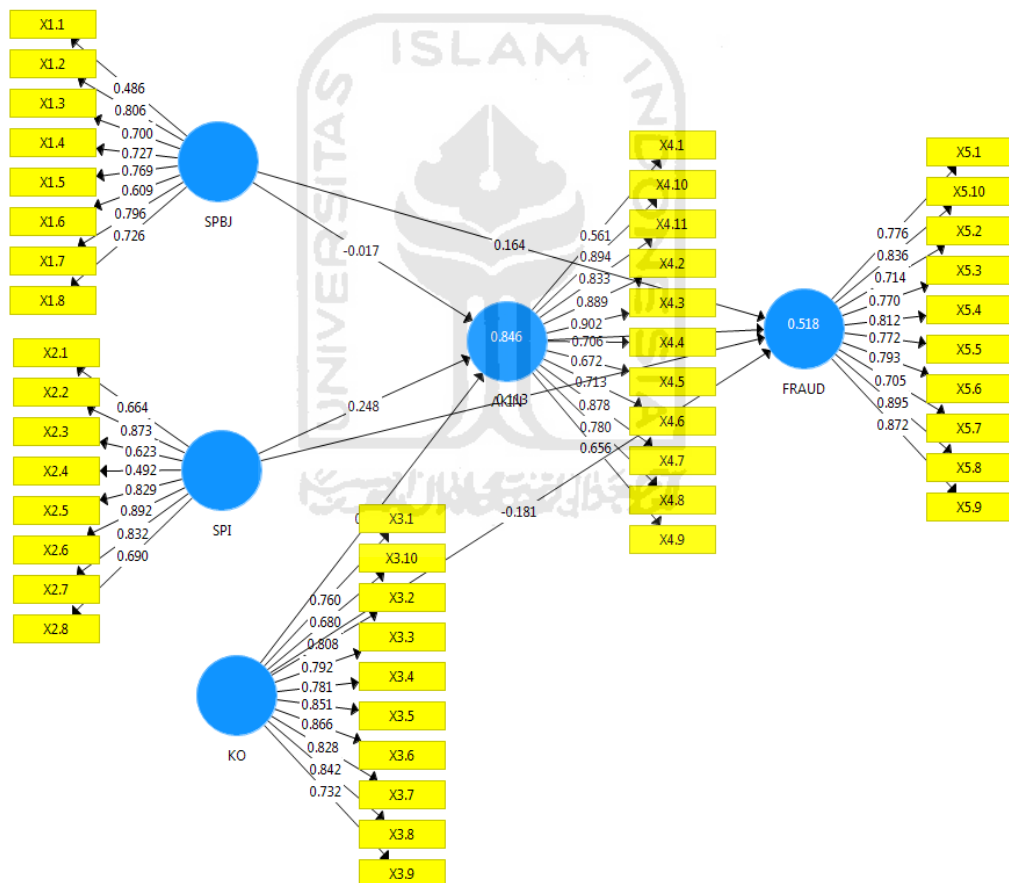


## Statistik Deskriptif

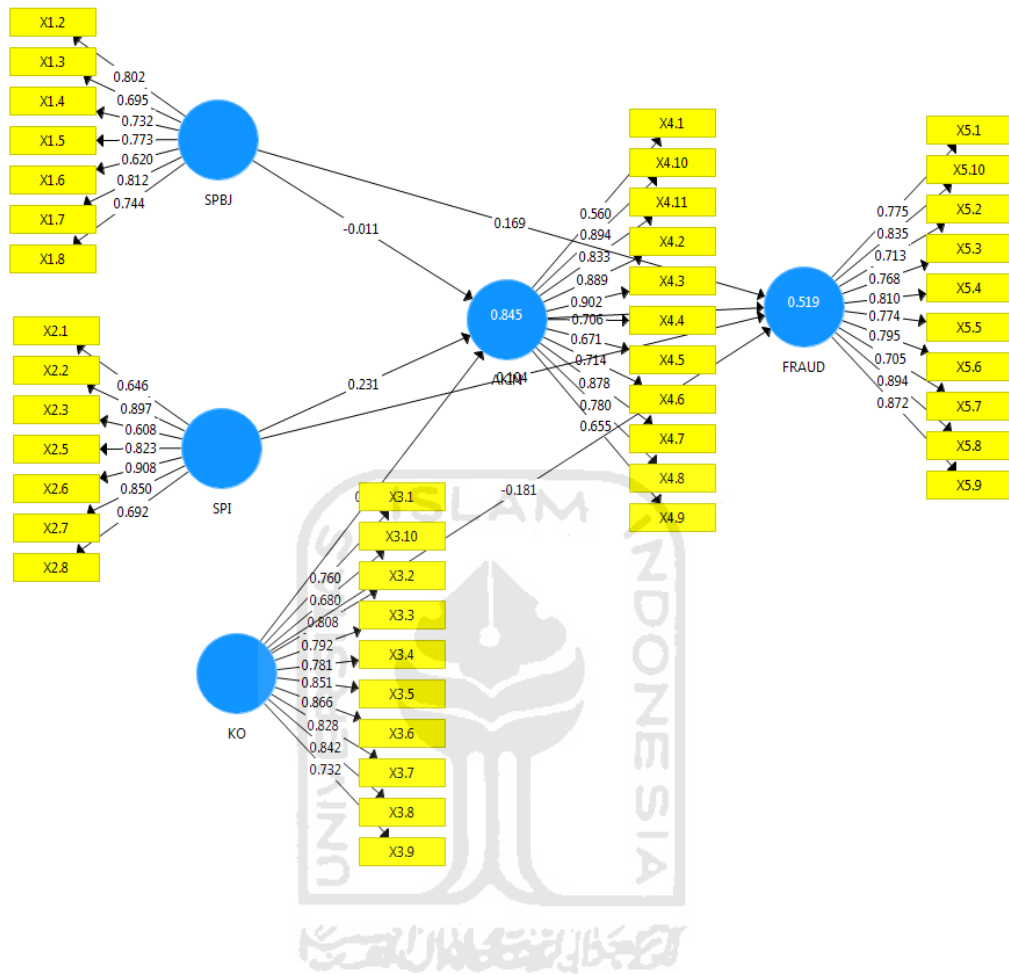
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA	85	3.38	5.00	4.3779	.45886
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	85	2.50	5.00	4.2647	.47771
KOMITMEN ORGANISASI	85	1.00	5.00	3.8659	.66843
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH	85	2.09	5.00	4.1016	.50682
PENCEGAHAN FRAUD	85	2.50	5.00	4.0176	.57821
Valid N (listwise)	85				

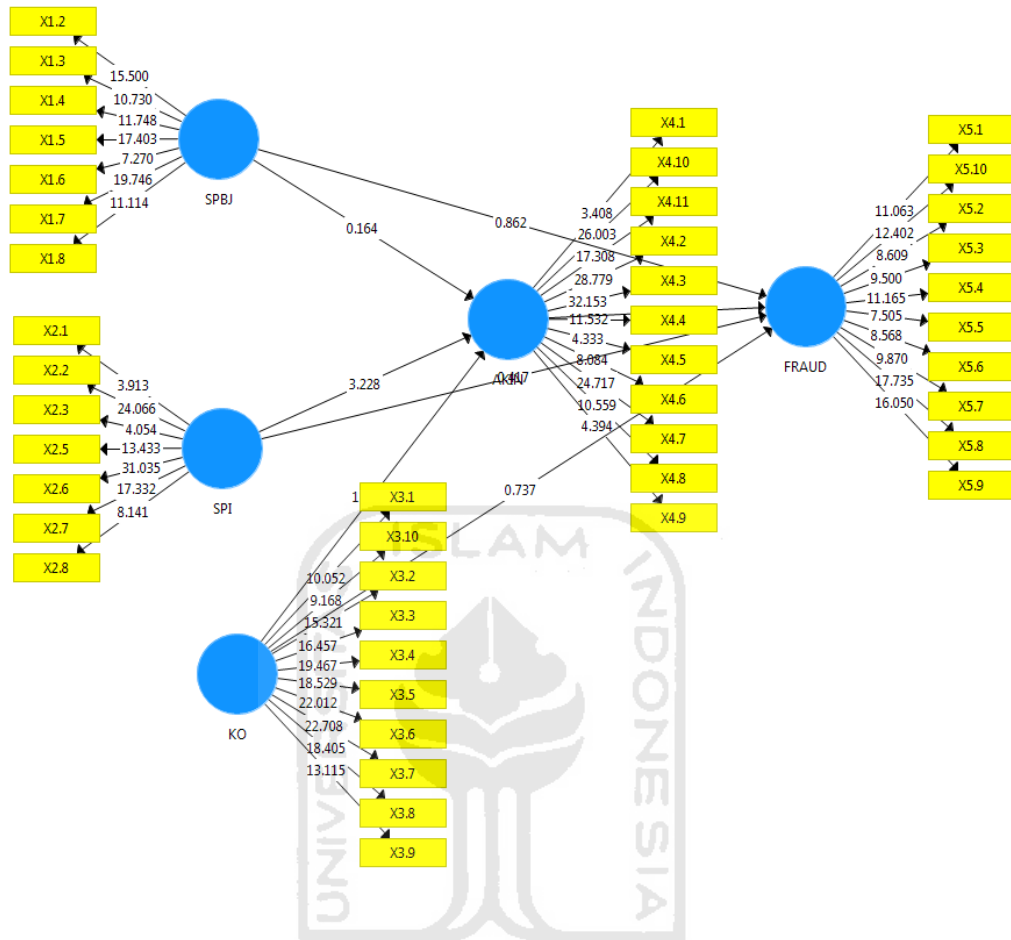
Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor Sebelum Potong



## Diagram Jalur dan Nilai Loading Factor Sesudah Potong



## Nilai Loading Factor Model Struktural (Inner Model)



## Outer Loadings

- Mean, STDEV, T-Values, P-Values
- Confidence Intervals
- Confidence Intervals Bias Corrected
- Samples

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1.2 <- SPBJ	0.802	0.804	0.052	15.500	0.000
X1.3 <- SPBJ	0.695	0.701	0.065	10.730	0.000
X1.4 <- SPBJ	0.732	0.732	0.062	11.748	0.000
X1.5 <- SPBJ	0.773	0.776	0.044	17.403	0.000
X1.6 <- SPBJ	0.620	0.618	0.085	7.270	0.000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1.7 <- SPBJ	0.812	0.815	0.041	19.746	0.000
X1.8 <- SPBJ	0.744	0.746	0.067	11.114	0.000
X2.1 <- SPI	0.646	0.647	0.165	3.913	0.000
X2.2 <- SPI	0.897	0.894	0.037	24.066	0.000
X2.3 <- SPI	0.608	0.603	0.150	4.054	0.000
X2.5 <- SPI	0.823	0.813	0.061	13.433	0.000
X2.6 <- SPI	0.908	0.905	0.029	31.035	0.000
X2.7 <- SPI	0.850	0.847	0.049	17.332	0.000
X2.8 <- SPI	0.692	0.686	0.085	8.141	0.000
X3.1 <- KO	0.760	0.750	0.076	10.052	0.000
X3.10 <- KO	0.680	0.676	0.074	9.168	0.000
X3.2 <- KO	0.808	0.804	0.053	15.321	0.000
X3.3 <- KO	0.792	0.786	0.048	16.457	0.000
X3.4 <- KO	0.781	0.781	0.040	19.467	0.000
X3.5 <- KO	0.851	0.844	0.046	18.529	0.000
X3.6 <- KO	0.866	0.860	0.039	22.012	0.000
X3.7 <- KO	0.828	0.825	0.036	22.708	0.000
X3.8 <- KO	0.842	0.837	0.046	18.405	0.000
X3.9 <- KO	0.732	0.731	0.056	13.115	0.000
X4.1 <- AKIN	0.560	0.564	0.164	3.408	0.001
X4.10 <- AKIN	0.894	0.893	0.034	26.003	0.000
X4.11 <- AKIN	0.833	0.830	0.048	17.308	0.000
X4.2 <- AKIN	0.889	0.888	0.031	28.779	0.000
X4.3 <- AKIN	0.902	0.902	0.028	32.153	0.000
X4.4 <- AKIN	0.706	0.702	0.061	11.532	0.000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X4.5 <- AKIN	0.671	0.682	0.155	4.333	0.000
X4.6 <- AKIN	0.714	0.710	0.088	8.084	0.000
X4.7 <- AKIN	0.878	0.877	0.036	24.717	0.000
X4.8 <- AKIN	0.780	0.768	0.074	10.559	0.000
X4.9 <- AKIN	0.655	0.660	0.149	4.394	0.000
X5.1 <- FRAUD	0.775	0.766	0.070	11.063	0.000
X5.10 <- FRAUD	0.835	0.830	0.067	12.402	0.000
X5.2 <- FRAUD	0.713	0.702	0.083	8.609	0.000
X5.3 <- FRAUD	0.768	0.763	0.081	9.500	0.000
X5.4 <- FRAUD	0.810	0.805	0.073	11.165	0.000
X5.5 <- FRAUD	0.774	0.786	0.103	7.505	0.000
X5.6 <- FRAUD	0.795	0.803	0.093	8.568	0.000
X5.7 <- FRAUD	0.705	0.701	0.071	9.870	0.000
X5.8 <- FRAUD	0.894	0.890	0.050	17.735	0.000
X5.9 <- FRAUD	0.872	0.870	0.054	16.050	0.000

### Path Coefficients

- Mean, STDEV, T-Values, P-Values
- Confidence Intervals
- Confidence Intervals Bias Corrected
- Samples

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
AKIN -> FRAUD	0.680	0.679	0.256	2.658	0.008
KO -> AKIN	0.730	0.723	0.062	11.713	0.000
KO -> FRAUD	-0.181	-0.141	0.245	0.737	0.461

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
SPBJ -> AKIN	-0.011	-0.013	0.066	0.164	<b>0.870</b>
SPBJ -> FRAUD	0.169	0.118	0.196	0.862	<b>0.389</b>
SPI -> AKIN	0.231	0.241	0.072	3.228	<b>0.001</b>
SPI -> FRAUD	0.104	0.121	0.250	0.417	<b>0.677</b>

### Total Indirect Effects

- Mean, STDEV, T-Values, P-Values
- Confidence Intervals
- Confidence Intervals Bias Corrected
- Samples

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
AKIN -> FRAUD					
KO -> AKIN					
KO -> FRAUD	0.496	0.491	0.189	2.630	<b>0.009</b>
SPBJ -> AKIN					
SPBJ -> FRAUD	-0.007	-0.007	0.043	0.171	<b>0.865</b>
SPI -> AKIN					
SPI -> FRAUD	0.157	0.163	0.082	1.919	<b>0.056</b>



### Specific Indirect Effects

- Mean, STDEV, T-Values, P-Values
- Confidence Intervals
- Confidence Intervals Bias Corrected
- Samples

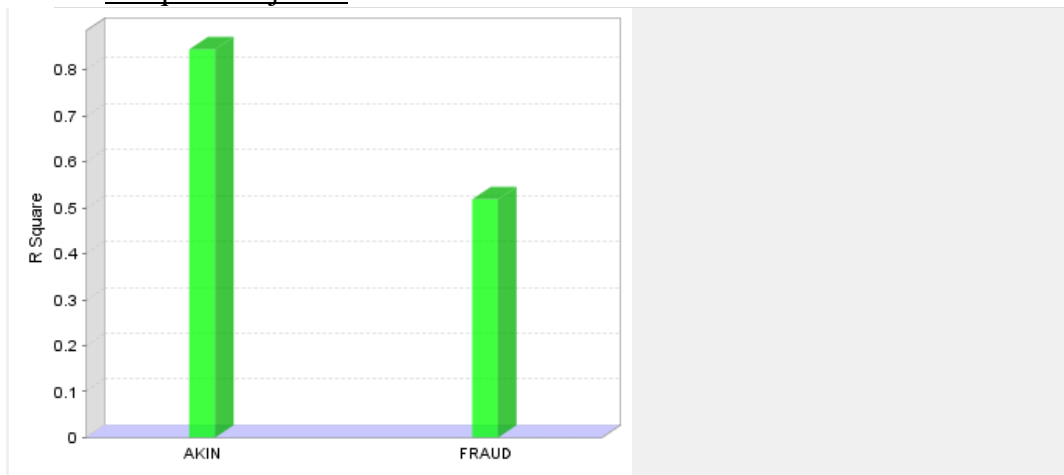
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
KO -> AKIN -> FRAUD	0.496	0.491	0.189	2.630	<b>0.009</b>
SPBJ -> AKIN -> FRAUD	-0.007	-0.007	0.043	0.171	<b>0.865</b>
SPI -> AKIN -> FRAUD	0.157	0.163	0.082	1.919	<b>0.056</b>

### R-Square dan R-Square Adjusted

	R Square	R Square Adjusted	Q Square
AKIN	0.845	0.839	
FRAUD	0.519	0.494	0.925

### R Square Charts

- R Square
- R Square Adjusted



### F-Square

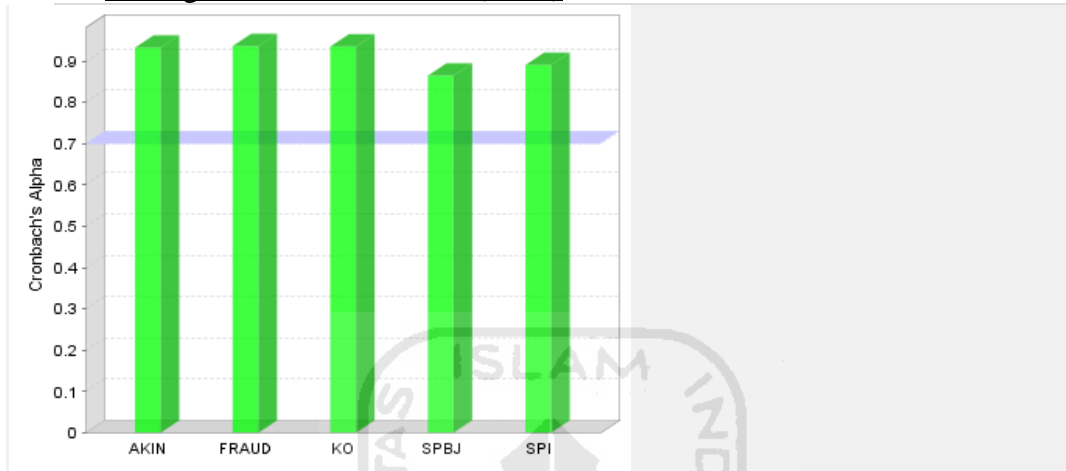
	AKIN	FRAUD	KO	SPBJ	SPI
AKIN		0.149			
FRAUD					
KO	1.170	0.011			
SPBJ	0.000	0.031			
SPI	0.104	0.006			

### Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
AKIN	0.932	0.940	0.943	0.607
FRAUD	0.936	0.947	0.945	0.634
KO	0.935	0.938	0.945	0.633
SPBJ	0.864	0.882	0.895	0.551
SPI	0.890	0.900	0.916	0.614

### Construct Reliability and Validity Charts

- Cronbach's Alpha
- rho A
- Composite Reliability
- Average Variance Extracted (AVE)



### Discriminant Validity

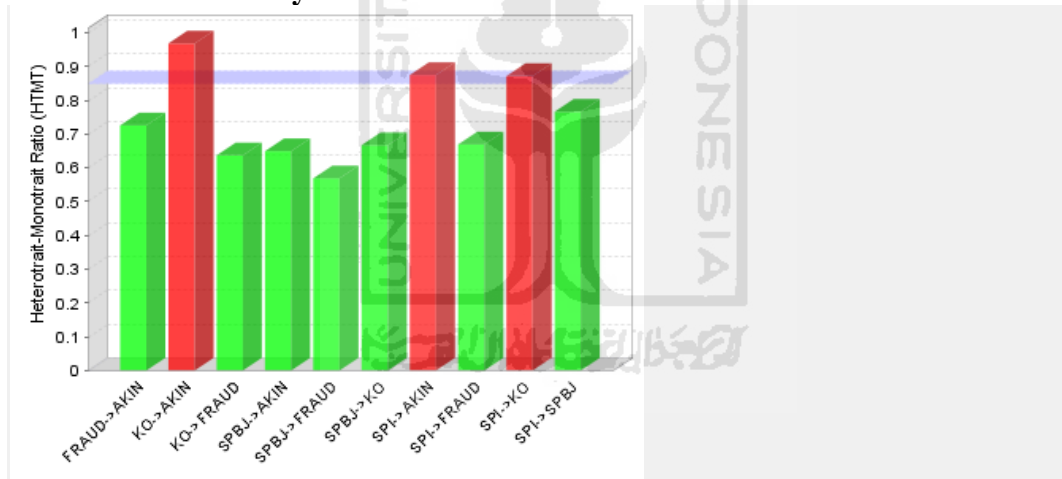
- Fornell-Larcker Criterion
- Cross Loadings
- Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	AKIN	FRAUD	KO	SPBJ	SPI
X1.2	0.543	0.419	0.534	0.802	0.593
X1.3	0.442	0.359	0.507	0.695	0.542
X1.4	0.424	0.302	0.394	0.732	0.449
X1.5	0.557	0.493	0.568	0.773	0.543
X1.6	0.302	0.219	0.317	0.620	0.285
X1.7	0.451	0.513	0.475	0.812	0.557
X1.8	0.277	0.363	0.328	0.744	0.430
X2.1	0.436	0.521	0.411	0.589	0.646
X2.2	0.682	0.549	0.717	0.536	0.897
X2.3	0.402	0.530	0.429	0.625	0.608

	<b>AKIN</b>	<b>FRAUD</b>	<b>KO</b>	<b>SPBJ</b>	<b>SPI</b>
<b>X2.5</b>	0.683	0.412	0.678	0.555	0.823
<b>X2.6</b>	0.757	0.464	0.751	0.526	0.908
<b>X2.7</b>	0.669	0.466	0.687	0.584	0.850
<b>X2.8</b>	0.727	0.500	0.654	0.334	0.692
<b>X3.1</b>	0.662	0.424	0.760	0.461	0.658
<b>X3.10</b>	0.618	0.426	0.680	0.300	0.479
<b>X3.2</b>	0.732	0.570	0.808	0.451	0.680
<b>X3.3</b>	0.696	0.501	0.792	0.453	0.586
<b>X3.4</b>	0.666	0.452	0.781	0.570	0.635
<b>X3.5</b>	0.777	0.555	0.851	0.555	0.717
<b>X3.6</b>	0.802	0.514	0.866	0.592	0.735
<b>X3.7</b>	0.790	0.559	0.828	0.455	0.535
<b>X3.8</b>	0.779	0.466	0.842	0.561	0.751
<b>X3.9</b>	0.686	0.491	0.732	0.516	0.615
<b>X4.1</b>	0.560	0.509	0.448	0.401	0.351
<b>X4.10</b>	0.894	0.652	0.804	0.418	0.709
<b>X4.11</b>	0.833	0.515	0.795	0.557	0.759
<b>X4.2</b>	0.889	0.575	0.810	0.484	0.746
<b>X4.3</b>	0.902	0.545	0.851	0.508	0.709
<b>X4.4</b>	0.706	0.475	0.655	0.498	0.595
<b>X4.5</b>	0.671	0.739	0.580	0.596	0.554
<b>X4.6</b>	0.714	0.421	0.667	0.336	0.552
<b>X4.7</b>	0.878	0.492	0.816	0.432	0.743
<b>X4.8</b>	0.780	0.495	0.730	0.362	0.612
<b>X4.9</b>	0.655	0.581	0.532	0.528	0.517
<b>X5.1</b>	0.448	0.775	0.366	0.402	0.344

	AKIN	FRAUD	KO	SPBJ	SPI
X5.10	0.494	0.835	0.479	0.462	0.494
X5.2	0.363	0.713	0.292	0.379	0.266
X5.3	0.410	0.768	0.375	0.372	0.455
X5.4	0.449	0.810	0.436	0.376	0.491
X5.5	0.749	0.774	0.691	0.392	0.668
X5.6	0.754	0.795	0.713	0.401	0.677
X5.7	0.484	0.705	0.404	0.422	0.424
X5.8	0.580	0.894	0.497	0.522	0.488
X5.9	0.617	0.872	0.507	0.496	0.476

### Discriminant Validity Charts



# LAMPIRAN 4

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**



## Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. 515865, 562682 Fax. 520332  
EMAIL : [layanangepadaan@jogjakota.go.id](mailto:layanangepadaan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/1.0263

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Teuku Achmad Karnegi, ST., MM  
Jabatan : Ka. Subbag Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : Marsita Wuri Andari  
NIM : 17919053  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Yogyakarta dengan tugas akhir (tesis) berjudul **“Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan / atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Maret 2020

An/Kepala,  
Ka. Subbag. Pembinaan PBJ

**TEUKU ACHMAD KARNEGI, ST., MM**

NIP. 197705072006041001

## Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Gunungkidul



### PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813  
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006  
Posel : [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id), Laman : [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id)

#### SURAT KETERANGAN

No. 07/018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Ir. SLAMET SUPRIYADI
- b. Jabatan : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Gunungkidul
- c. Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

- a. Nama : Marsita Wuri Andari
- b. NIM : 17919053
- c. Program Studi : Magister Akuntansi
- d. Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- e. Maksud : Telah melakukan penelitian di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Gunungkidul dengan tugas akhir (tesis) berjudul "Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan / atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan *Fraud*."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wonosari, 26 Februari 2020

Kepala BLP Kabupaten Gunung Kidul



**Ir. SLAMET SUPRIYADI**

NIP. 19640508 199503 1 003



## Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Kulon Progo



### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. 773010 Fax. 775213 Wates 55611

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN No. 070/ 34

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANANG ADRIANTO, SE  
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Kulon Progo  
Alamat : Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : MARSITA WURI ANDARI  
NIM : 17919053  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan tugas akhir (tesis) berjudul **"Pengaruh Sistem Pengadaan Barang dan / atau Jasa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 27 Februari 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
u.b. ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA  
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SETDA KABUPATEN KULON PROGO

  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
**DANANG ADRIANTO, SE**  
NIP. 19651127 199403 1 003